

DENNY J.A.

Catatan Politik



LKIS

Sanksi Pelanggaran Pasal 44
Undang-undang Nomor Tahun 1987 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hal Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Catatan Politik

Denny J.A.

xii + 132 halaman: 14,5 x 21 cm

1. Ilmu Politik
2. ISBN : 979-25-5238-3

Penyunting Naskah: Fransiskus Surdiasis

Rancang Sampul: Imam Syahirul Alim

Setting/layout : Santo

Penerbit

LKIS Yogyakarta

Salakan Baru No.1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Tlp. (0274) 387194/7472110

Faks. (0274) 417762

Cetakan I: Agustus 2006

*Untuk Tiga Matahari :
Mulia Jayaputri Istriku,
Rafi dan Rami Anakku*

SEKAPUR SIRIH

Politik Indonesia periode 1995-1999 adalah periode yang dinamis. Sejak 1995 sudah dapat dirasakan bahwa Orde Baru sudah hamil tua dan akan lahir anak zaman yang baru. Yang tidak diduga, ternyata proses kelahiran itu terjadi secara sungsgang. Sang anak lahir dengan sedikit cacat, sedangkan sang ibu berada dalam proses koma, antara hidup dan mati.

Anak zaman yang dilahirkan orde baru sedikit cacat karena ia hadir secara tidak komplit. Diharapkan anak zaman itu murni membawa prinsip demokrasi. Namun yang terjadi, demokrasi yang terealisasi hanya sebagian. Masih banyak unsur yang non-demokratis terbawa serta, seperti bertahannya politik militer di DPR (diangkat), tidak semua anggota parlemen dipilih. Sedangkan sang Ibu Orde Baru tidak benar-benar mati walaupun juga tidak benar-benar hidup. Unsur politik status quo Orde Baru yang otoritarian masih hidup walau kembang kempis.

Bagi seorang penulis dan aktivis, periode itu adalah lahan menakjubkan untuk diamati, dikomentari dan dianalisa. Dalam periode itu kebetulan saya berada di Amerika Serikat, melanjutkan sekolah di bidang comparative politics di Ohio State University. Ketika terjadi perubahan besar yang berujung pada jatuhnya Soeharto, saya masih disana. Namun, secara rutin saya menulis, terutama untuk Koran Kompas dan Majalah Gatra. Saya pun tetap menulis makalah untuk kuliah.

Buku ini adalah kumpulan sebagian dari tulisan periode itu. Secara kese-luruhan ada lima buku yang dihasilkan dalam periode itu. Dua buku adalah kumpulan makalah dalam bahasa Inggris, yang diterbitkan dengan judul: "The Role of govern-ment in economy and Business" dan "Various Topics in Comparative Politics" .

Dua buku lainnya dalam bahasa Indonesia khusus untuk merespon gerakan reformasi 1998. Yang satu berjudul : "Jatuhnya Soeharto dan Transisi ke Demokrasi" . Buku ini adalah kumpulan catatan dan analisa peristiwa, mulai dari krisis Asia,kerusuhan Mei 1997, munculnya gerakan mahasiswa, jatuhnya Soeharto, ke-menangan PDIP Perjuangan, Politisasi Ulama, sampai ke masa depan transisi demo-krasi yang agak suram.

Yang lainnya berjudul: "Visi Indonesia Baru, setelah Gerakan Reformasi 1998" . Buku ini menawarkan visi politik untuk membangun Indonesia Baru. Gerakan reformasi memang sudah dimulai. Namun konsep politik Indonesia baru masih harus terus dicari dan diperdebatkan. Buku ini menawarkan visi baru yang bersandar pada filsafat kebebasan (liberalisme).

Di luar empat buku di atas, masih banyak kolom politik saya yang tercecer, yang merespon berbagai persoalan, dan tak dapat difokuskan hanya ke satu isu tung-gal. Kolom politik itulah yang dikumpulkan dalam buku ini yang diberi judul "Cata-tan Politik. Kolom dalam "Catatan Politik" umumnya merespon situasi politik dan ekonomi sebelum pemilu 1999. Peristiwa politik dalam kolom itu memang sudah ber-lalu, namun analisa, teori dan rekomendasi politik di dalamnya masih terus relevan.

Pertimbangan ini pulalah yang mendorong saya untuk menerbitkan kembali buku yang sekarang ada di tangan Anda, di saat reformasi telah berusia sewindu. Pertama buku ini diterbitkan sebagai sebuah dokumentasi pemikiran yang pernah saya lontarkan di awal-awal reformasi.

Kedua, sejumlah gagasan yang terkandung dalam buku ini rasanya masih perlu terus diupayakan guna memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia. Bagaimana meningkatkan kualitas debat politik guna memperkokoh demokrasi dan prasyarat tentang perlunya spirit

public untuk merawat demokrasi itu adalah sedikit contoh tentang masih relevannya keprihatinan yang saya lontarkan di masa lalu dengan kondisi kita di masa sekarang.

Terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendorong saya untuk terus belajar, membaca dan menulis.

Jakarta, Agustus 2006

Denny J.A

DENNY J.A

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih * ...

Daftar Isi * ...

Bab I: Isu Demokrasi dan Hak Asasi

1. Mengawali Agenda Perubahan * ..
2. Memperkuat Parlemen Kita * ...
3. Memperkuat Debat Publik* ...
4. Konflik Kepentingan * ...
5. Prospek Demokrasi* ...
6. Kepentingan Publik * ...
7. Sanksi Ekonomi untuk Hak Asasi * ...

Bab II: Isu Agama dan Kultur

1. Mengendalikan Politisasi Agama * ...
2. Kerusuhan * ...
3. Memperbaharui Kultur Politik * ...
4. Mencari Visi * ...
5. Agama dan Politik * ...
6. Primordialisme Amerika * ...

Bab III: Isu Manuver Politik

1. Tokoh 1995 * ...
2. Kolumnis Politik * ...
3. Jiang Zemin dan Amerika Serikat * ...
4. Fleksibel * ...

5. Belajar dari Kasus PDI * ...
6. Politik 1996 * ...
7. Iklan Politik * ...
8. Reformasi * ...
9. Politik Megawati * ...

BAB IV: Isu Seputar Krisis Ekonomi dan Politik

1. Perhatian Amerika Serikat * ...
2. Sidang MPR dan Konflik Elit * ...
3. Kelemahan IMF * ...
4. Manajer Reformasi * ...

Daftar Kepustakaan * ...

Daftar Buku Denny J.A * ...

BAB 1

Isu Demokrasi dan Hak Azasi

Mengawali Agenda Perubahan

Terasa bahwa berbagai dinamika politik jauh hari sebelum lahirnya gerakan reformasi 1998 telah menunjukkan adanya sebuah perkembangan baru yang agaknya semakin sulit diakomodasi oleh format politik lama. Semakin terasa menguatnya kontradiksi internal dalam sistem politik ekonomi kita.

Kita merasakan adanya perkembangan yang paradoksal. Ekonomi Indonesia begitu fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan mutakhir dunia. Komitmen kepada perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi sudah diambil. Sungguhpun masih terjadi praktek proteksi di sana-sini, namun kecenderungan liberalisasi itu semakin dirasakan.

Namun di sisi lain dunia politik kita terasa kurang fleksibel. Sebelum bulan Mei 1998 kita tidak merasakan adanya perubahan yang substansial seperti yang terjadi di dunia ekonomi. Sementara berbagai negara di bagian dunia lainnya sudah banyak yang berubah.

Kita dapat mulai dengan melihat format politik apa yang kita punya sebelum 1998, lalu menunjukkan mengapa format politik ini sudah harus berubah, cepat atau lambat. Di luar negeri banyak ahli Indonesia yang berupaya menggambarannya. Satu tulisan yang cukup mewakili adalah Harold Crouch yang dimuat oleh Jurnal World Politics (1979). Artikel ini sudah cukup lama namun kita masih merasakan kebena-rannya karena memang format politik Indonesia belum banyak berubah.

Menurut Crouch, format politik Indonesia menyimpan elemen neo-patrimonialisme. Term "patrimonialisme" itu sendiri berasal dari Weber untuk mengistilahkan bentuk organisasi social yang belum mencapai karakter birokrasi modern yang impersonal dan rasional. Sedangkan term "neo" menunjuk pada perkembangan baru suatu organisasi sosial yang sudah menggunakan berbagai sarana modern namun masih mempunyai karakter patrimonialisme.

Dalam neo-patrimonialisme, stabilitas sistem terjaga bukan karena sistem ini rasional, efisien dan adil, melainkan karena kemampuan sang pemimpin untuk merekatkan berbagai kelompok kepentingan di sekitarnya. Loyalitas berbagai kekuatan politik cukup kuat karena distribusi pemenuhan kepentingan berbagai kelompok kepentingan itu terselenggara dengan baik. Berbagai Negara neo-patrimonialisme di Dunia Ketiga selalu ditandai oleh personalism, yaitu besarnya peran dan kewibawaan pemimpin untuk mendistribusikan benefit dalam rangka mendapatkan loyalitas politik.

Namun stabilitas neo-patrimonialisme ini mensyaratkan dua kondisi. Syarat pertama adalah adanya keseragaman pandangan politik dan ideology di kalangan elite dan kekuatan utama. Seandainya pun terjadi konflik elite, konflik itu semata berdasarkan kepentingan pribadi bukan karena perbedaan ideology dan program

politik. Dengan demikian konstruksi neo-patrimonialisme itu sendiri tidak ditantang untuk berubah.

Syarat kedua adalah adanya depolitisasi massa. Dalam konstruksi neo-patrimonialisme, massa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan politik. Dalam kondisi massa yang terfragmentasi secara primordial berdasarkan sentiment agama, ras, atau etnis, dan masih rendahnya daya pikir kritis dan tidak well informed, pelibatan massa dalam politik dapat menggoyahkan stabilitas dan membawa kese-luruhan sistem surut ke belakang.

Dua kondisi ini dapat menjelaskan mengapa neo-patrimonialisme di era Dem-okrasi Terpimpin gagal, namun, di Orde Baru sangat berhasil. Di era demokrasi Ter-pimpin, kalangan elit terbelah secara tajam dalam perbedaan ideologis: antara militer dan elite dari kalangan PNI yang nasionalistik di satu sisi, dan komunisme (PKI) di sisi lainnya. Keterbelahan ideologis ini diramaikan pula oleh masih kuatnya politik Islam ataupun aspirasi politik golongan Social Democrat. Elite dan kekuatan politik utama mengalami ketidaksepakatan yang ideologis dan politis sifatnya tentang bagaimana sebaiknya Negara diselenggarakan.

Pada saat yang sama, massa mengalami radikalisasi baik di kota besar maupun di desa-desa. Radikalisasi ini juga bersifat ideologis antara pendukung PKI dan mereka yang tumbuh bergerak melawannya. Rusaknya perekonomian di ujung Dem-okrasi Terpimpin memperburuk suasana. Konstruksi neo-patrimonialisme tidak lagi mampu merekatkan berbagai dinamika politik yang ada. Pada waktunya sistem ini pun ambruk dan terjadi pergantian kepemimpinan.

Orde Baru lahir dengan kembali menegakkan neo-patrimonialisme namun dengan perbaikan yang substansial. Berbagai program dan undang-undang politik yang dibuat selama Orde Baru pada

dasarnya memberikan infrastruktur yang dibutuhkan bagi stabilitas neo-patrimonialisme itu. Kekuatan politik utama sekarang relatif berada dalam tata ideology yang sama. Perpecahan ideologis antar-elite yang dijumpai di era demokrasi Terpimpin tidak lagi hadir di era Orde Baru. Massa pun berhasil dipisahkan dari politik praktis.

Proyek homogenisasi elite dan depolitisasi massa ini berhasil karena ditopang oleh pembangunan ekonomi yang sukses. Keberhasilan ekonomi ini memudahkan pemimpin untuk mendistribusikan benefit ke lingkaran politik utama. Berbagai konflik kepentingan antar-elite yang ada dapat diselesaikan dengan memberikan pos politik ataupun reward ekonomi yang dapat memuaskan pihak yang bertikai.

Ekonomi modern menghendaki kompetisi, namun neopatrimonialisme tertanam dalam sistem favoritism. Yang satu tumbuh karena keterbukaan sementara yang lain berada dalam ketertutupan. Yang satu semakin bergerak menuju impersonal or-order, yang lain berdasarkan personalisme. Singkat kata seperti yang disinggung Crouch, konstruksi neo-patrimonialisme Orde Baru berdiri pada fondasi pembangunan ekonomi yang semakin modern dan semakin tidak bersifat patrimonial. Konstruksi neopatrimonialisme itu pada waktunya akan juga runtuh karena keberhasilan pembangunan ekonomi yang dibuahkan.

Tidak diragukan bahwa pembangunan ekonomi Orde Baru sudah sangat berhasil. Laporan Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai bagian dari keajaiban Asia Timur, bersama-sama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Cina dan Jepang. Dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen per tahun, ekonomi Indonesia akan terus menambah jumlah kelas menengah dan buruh.

Sudah menjadi fenomena umum bahwa kemajuan ekonomi suatu negara akan meminta partisipasi politik lebih luas dan juga tuntutan

berkurangnya keterlibatan pemerintah dalam politik. Liberalisasi ekonomi pada waktunya melahirkan tuntutan deregulasi politik.

Negara tetangga di Asia seperti Jepang, Korea selatan, Thailand, Malaysia, Filipina dan Taiwan sudah berada di jalan ini, dari kesuksesan pembangunan ekonomi menuju demokratisasi. Singapura memang memilih jalannya sendiri yang berbeda. Namun, Singapura tidak dapat dijadikan ukuran karena posisinya yang unik, sebuah Negara kota dengan jumlah penduduk yang hanya separuh dari penduduk Jakarta. Suka atau tidak, hukum-hukum social ekonomi akan membawa Indonesia ke jalan sebagaimana yang ditempuh Jepang dan Negara sukses lainnya di Asia.

Sangatlah beralasan, dalam rangka berpikir ke depan, Negara kita juga sudah harus menyiapkan agenda perubahan untuk mereformasi format politik lama. Antisipasi dan persiapan yang dini dapat mengurangi kadar kekerasan akibat tumbuhnya aspirasi baru. Format politik baru dengan sendirinya harus kompatibel dengan sistem ekonomi yang dipilih. Karena sistem ekonomi kita akan semakin liberal, bersandar kepada mekanisme pasar yang kompetitif, format politik yang harus dikembangkan adalah yang juga favorable dengan kultur kompetisi itu.

Dapat dibayangkan, beberapa institusi dan konsensus yang sangat fungsional dengan format politik harus ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kultur kom-petisi. Otoritas Pembina politik, misalnya harus lebih dibatasi untuk tidak mudah mengintervensi. Alasannya sederhana. Pembina politik adalah kader partai tertentu. Menjadi janggal jika kader partai tertentu membina partai saingannya sendiri yang sama-sama menjadi peserta pemilu. Bias dan konflik kepentingan mudah terjadi.

Sesungguhnya tidak ada yang istimewa dengan kultur kompetisi di dunia politik. Berbagai Negara yang sukses sudah

mempraktekkannya, baik di Barat maupun di Timur, baik yang berkultur liberal di AS, kultur Khong Hu Chu di Taiwan, ataupun yang penduduknya mayoritas Islam di Malaysia. Jika dunia ekonomi kita sudah mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan liberalisasi, dunia politik kita tentunya akan pula mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan demokratisasi di berbagai belahan bumi, sejauh hal itu memang dikehendaki oleh kekuatan utama negeri ini.*

Memperkuat Parlemen Kita

Pada awal Oktober 1997 seribu anggota parlemen (MPR/ DPR) periode 1997-2002 dilantik untuk bertugas. Situasi yang dihadapi para anggota parlemen yang baru sedikit berbeda dengan anggota periode sebelumnya. Kini di Tanah Air, jumlah lapisan terpelajar semakin banyak, kelompok bisnis dan kelas menengah lainnya semakin subur, kesejahteraan ekonomi juga semakin meningkat. Sementara isu politik yang rawan juga semakin sering terdengar, mulai dari aneka kerusuhan primordial di berbagai daerah sampai ke isu semakin menuanya usia Soeharto.

Menyangkut pelantikan anggota parlemen yang baru, ada baiknya kita sedikit membuat perenungan. Pertanyaan yang dapat dipikirkan adalah apakah yang harus dilakukan untuk memperkuat parlemen kita? Dengan demikian, parlemen yang merupakan lembaga wakil rakyat itu semakin berfungsi sebagai wakil rakyat dan semakin punya pengaruh yang riil dalam pembentukan kebijakan public di Tanah Air.

Satu cara untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan membuat studi perbandingan dengan Negara lain. Melalui studi perbandingan, kekuatan dan kelemahan parlemen Negara lain dapat menjadi masukan yang berharga. Tentu disadari, adanya perbedaan historis, kultur, ekonomi, dan politik di berbagai negara yang membuat setiap generalisasi mustahil dilakukan. Namun tentu ada pula persamaan yang membuat sebuah model politik relevan untuk diadopsi atau setidaknya dimodifikasi sesuai dengan situasi kita. Parlemen itu sendiri sebenarnya adalah model yang bukan berasal dari tradisi kita seperti dari Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit, tetapi dari model poli-tik sejarah Barat. Toh ternyata model itu dapat dimodifikasi ke dalam sistem kita.

Tulisan singkat ini ingin menelusuri kembali sejarah pembentukan parlemen dan kekuatan parlemen di AS, sebagai input bagi penguatan lembaga parlemen kita di Tanah Air.

Parlemen yang kini dipunyai oleh semua Negara di dunia berasal dari Inggris dan Perancis ratusan tahun yang silam. Sampai kepada bentuknya yang sekarang, parlemen telah mengalami aneka perubahan fundamental. Lahirnya parlemen berawal dari masalah keuangan kerajaan. Raja Inggris dan Perancis membutuhkan dana tambahan untuk menjalankan pemerintahan. Cara pengumpulan dana dengan jalan pemaksaan dan upeti tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan itu. Raja membutuhkan dukungan dana dari kelompok masyarakat yang lebih besar dan dengan cara yang lebih suka rela.

Masyarakat politik saat itu menyetujui untuk memberi bantuan dana kepada kerajaan. Namun satu syarat ditetapkan. Mereka ingin turut mengontrol cara pengumpulan dana dan penyalurannya. Mereka ingin terlibat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar kepada kerajaan dan rencana pembiayaan proses pemerinta-

han. Parlemen pun terbentuk. Saat itu tugas awal dari parlemen hanya berhubungan dengan masalah uang.

Saat itu demokrasi seperti yang kita kenal saat ini belum tumbuh. Sistem pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang merupakan tonggak sistem demokrasi belum dikenal. Anggota parlemen saat itu memang dipilih, tetapi para pemilihnya sangat terbatas. Dalam pengalaman Amerika Serikat, misalnya di zaman konstitusi AS pertama kali ditulis abad ke-18, jumlah mereka yang diberi hak memilih hanya enam persen dari total populasi orang dewasa. Yang diberi hak memilih hanya mereka yang dianggap berbudaya dan itu dikaitkan dengan property, gender, ras, dan agama tertentu.

Perubahan mendasar atas parlemen datang dengan lahirnya demokrasi modern. Ada dua hal penting yang dibawa oleh demokrasi modern. Pertama adalah perubahan konsep masyarakat politik dari lapisan masyarakat tertentu (jumlah property, gender, ras, agama tertentu) menuju semua warga Negara dewasa tanpa kecuali. Seorang warga Negara mulai diyakini lahir dengan hak yang tidak dapat diingkari, termasuk hak untuk memilih pemerintahan, terlepas dari jumlah uang dan property yang ia miliki, serta gender, ras dan agama yang ia peluk.

Lahirilah konsep universal suffrage, yang memberi hak yang sama kepada orang dewasa untuk memilih siapa yang berhak memerintah melalui pemilihan umum. Di Amerika Serikat sendiri, universal suffrage datang dengan sangat lambat. Baru di tahun 1920, dengan diratifikasinya amendemen kesembilan belas ke dalam konstitusi, wanita dewasa diberikan hak untuk memilih. Sedangkan warga kulit hitam, sungguhpun sudah diakui mempunyai hak memilih sejak tahun 1870 (melalui amendemen kelima belas), namun secara efektif baru benar-benar dapat memilih secara missal di tahun 1960-an, setelah diberlakukannya The Civil Rights Acts.

Perubahan konsep masyarakat politik tentu juga berakhir pada perubahan komposisi anggota parlemen. Sebelum lahirnya demokrasi modern, anggota parlemen, mencerminkan bias masyarakat ningrat. Kini, melalui universal suffrage, parlemen mencerminkan komposisi politik masyarakat secara lebih riil.

Perubahan kedua yang dibawa oleh demokrasi modern adalah konsep pemerintahan. Diyakini, karena kedaulatan berada di tangan rakyat, legitimasi pemerintahan harus dari rakyat pula. Rakyat, melalui prosedur yang ditetapkan, dapat mengangkat dan memberhentikan rezim yang memerintah. Konsep ini memberikan efek yang besar baik ke dunia eksekutif ataupun parlemen. Di dunia eksekutif, kerajaan mengalami proses surut yang semakin tidak mendapatkan legitimasi untuk memerintah karena para raja tidak dipilih oleh rakyat. Di berbagai Negara Eropa, seperti di Inggris dan Belanda, atau di Jepang misalnya, sungguhpun raja masih ada, namun perannya hanya simbolis. Proses pemerintahan yang riil telah diambil alih oleh pihak eksekutif yang dipilih.

Di dunia parlemen, konsep itu mempengaruhi proses rekrutmen anggota. Pada awalnya, sebagian anggota parlemen itu diangkat oleh raja karena hak-hak khusus yang dimiliki oleh raja dan keluarga berdarah biru. Namun karena legitimasi beralih ke tangan rakyat, proses pengangkatan anggota parlemen semakin kehilangan legitimasi. Anggota parlemen, karena mereka dikonsepsikan sebagai wakil rakyat, harus dipilih sendiri oleh rakyat, bukan diangkat oleh lembaga politik lain.

Robert Axerold (1991) dari University of Michigan membuat studi per-bandingan tentang parlemen di banyak Negara. Ia berkesimpulan, parlemen terkuat didunia mungkin Kongres di Amerika Serikat. Kriteria yang digunakan adalah pengaruh parlemen

atas kebijakan public dan fasilitas yang dimiliki anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan itu. Parlemen (Kongres) AS memiliki otoritas untuk menaikkan atau menurunkan pajak, meloloskan atau tidak meloloskan belanja pemerintahan, menyetujui atau menolak pejabat inti pihak eksekutif (kecuali presiden dan wakil presiden terpilih) dan meratifikasi hukum dan perjanjian.

Parlemen di AS semakin aktif dalam memonitor dan mengontrol implementasi hukum. Yang paling ditakuti pihak eksekutif adalah investigasi parlemen. Melalui investigasi itu, parlemen AS mampu membuat sebuah isu menjadi perhatian public secara luas. Pihak eksekutif dengan mudah menjadi pihak tertuduh, jika parlemen mencium adanya gelagat penyelewengan hukum seperti korupsi. Untuk membuat in-vestigasi itu lancer, semua pihak yang bersangkutan diwajibkan memberi informasi sejujurnya. Penolakan memberikan informasi, atau kesengajaan memberi informasi yang salah dapat membuat pihak itu masuk penjara.

Ada dua hal yang membuat parlemen di AS itu kuat. Yang satu bersifat teknis sedangkan yang lainnya bersifat politis. Yang bersifat teknis, para anggota parlemen itu dilengkapi fasilitas informasi yang canggih untuk menjalankan tugasnya. Tersedia perpustakaan dan berbagai dokumen yang dibutuhkan, yang mudah diakses oleh para anggota parlemen, terutama dalam sistem komputerisasi dan internet seperti sekarang.

Yang jauh lebih membantu, semua anggota parlemen, terutama anggota terkuatnya, memiliki staff ahli yang memang berpengalaman di bidangnya. Suara anggota parlemen menjadi berwibawa karena informasi yang ia bawa sudah sedemikian matang dan strategis karena terlebih dahulu digodok oleh tim ahli di belakang mereka.

Faktor politis yang membuat parlemen AS menjadi sangat kuat adalah sumber legitimasi dan jaringan politik yang ia miliki. Semua

anggota parlemen di AS dipilih langsung oleh rakyat pemilih, dan tidak ada satupun yang diangkat. Anggota parlemen itu dengan sendirinya tidak berhutang budi kepada siapapun (apalagi pihak eksekutif), kecuali rakyat yang memilihnya. Kepentingan rakyat pemilih itulah yang menjadi komitmen dan penentu karirnya. Jika ia tidak memuaskan para pemilihnya, ia akan jatuh pada pemilihan umum berikutnya. Situasi ini sendiri sudah memberikan keberanian moral bagi sang anggota parlemen untuk berhadapan dengan sesama anggota parlemen lain ataupun untuk mengontrol pihak eksekutif.

Anggota parlemen ini juga didukung oleh jaringan politik yang kuat. Jaringan pertama adalah partai politik di mana ia menjadi anggota. Partai di AS, sebagaimana di Negara demokrasi lainnya, benar-benar berkuasa. Partai itu mandiri baik dalam pembentukan program ataupun pengumpulan dana. Jaringan partai bersifat nasional dan membuat koalisi dengan organisasi masyarakat lain yang memiliki kesamaan platform politik. Jaringan lainnya adalah berbagai kelompok kepentingan dan pers yang siap memobilisasi pendapat umum. Harus digarisbawahi pula, jaringan ini hanya mungkin bekerja dalam iklim kebebasan pers dan berorganisasi yang memadai.

Dengan fasilitas teknis dan kondisi politik di atas, parlemen di AS dapat bekerja maksimal dengan posisi politik yang sangat kuat. Pihak eksekutif dapat dikontrol oleh parlemen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan pro-fessional.

Tentu kita tidak dapat memperbandingkan parlemen kita dengan parlemen di AS. Parlemen di AS sudah tumbuh ratusan tahun dan mengalami penguatan melalui trial and error sekian lama. Parlemen kita baru berusia puluhan tahun, dan berada dalam konteks

historis yang berbeda, serta berbeda pula dalam kultur politik dan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun melalui studi perbandingan, setidaknya kita mendapatkan arah tentang hal apa yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan dan membuat perubahan dalam parlemen kita. Dalam sejarah parlemen itu sendiri, seperti telah diuraikan di atas, perubahan mendasar dalam tubuh parlemen adalah hal yang biasa. Tak ada satu lembaga pun yang dibentuk sekali jadi. Perubahan dan adaptasi atas lingkungan baru mutlak dilakukan agar lembaga itu semakin berfungsi dan relevan dengan zamannya. Dengan landasan ini, kita pun selalu membuka kemungkinan membuat perubahan secara gradual dan terkendali atas parlemen kita agar semakin mampu melaksanakan tugasnya.

Agar parlemen kita semakin kuat, dimensi teknis dan dimensi politis yang membuat parlemen AS itu kuat, agaknya layak dijadikan input.*

Memperkuat Debat Publik

Sebuah debat public yang penting dan hangat telah berlangsung di media massa di Tanah Air. Sebagai respon atas langkah bisnis keluarga Sudono Salim yang menjual perusahaan besarnya di Indonesia, PT Indofood, ke perusahaannya sendiri yang lebih kecil di Singapura, QAF Ltd., para ahli ekonomi, kalangan bisnis, politisi dan pemerintah terlibat dalam pro dan kontra.

Kualitas debat public itu tidak kalah dengan yang terjadi di Negara maju. Di luar minoritas pemberi respon yang emosional, umumnya debat publik atas kelompok Salim adalah perbincangan yang rasional, dengan data dan angka, argumentasi dan analisis, serta prioritas kepentingan dan nilai.

Pihak yang berdebat, kadang terkesan membela nilai yang sama, seperti kepentingan nasional. namun strategi mencapai nilai itu berbeda. Yang satu menekankan pada efek psikologi politik yang buruk karena memberi kesan akan ter-jadinya instabilitas politik

di Tanah Air. Langkah kelompok Salim dkhawatirkan mendorong kelompok bisnis lain melakukan hal serupa dan mengurangi kenyamanan invenstor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Yang setuju pada penjualan iti bersandar pada argument penerimaan pajak Negara Indonesia yang justru ber-tambah besar, lengkap dengan bukti angka-angkanya.

Kadang pihak yang berdebat juga menunjukkan perbedaan dalam nilai dan paradigma. Satu pihak menekankan pada kebebasan inisatif pengusaha di era global-isasi. Sedangkan pihak lain menekankan lebih pada etika dan tanggung jawab seorang pengusaha yang selama ini dibesarkan oleh fasilitas Negara, seperti monopoli.

Artikel pendek ini hendak member argument mengapa tradisi debat pub-lic, seperti atas kasus bisnis kelompok Salim, sangat penting. Tradisi debat public iti layak diteruskan di Tanah Air, serta diperkuat untuk merespon isu public lainnya di masa mendatang, baik bagi kebijakan yang dibuat pihak swasta, ataupun pihak pemerintah.

Fungsi pertama dari tradisi debat public seperti kasus Salim adalah terciptanya apa yang dalam literature politik disebut dengan Spirit. Agak sulit mencari tejemahan Indonesia yang pas bagi term Publik. Sama sulitnya seperti mencari terjemahan yang pas bagi term Civil Society, yang kadang diterjemahkan menjadi masyarakat madani, masyarakat warga Negara, ataupun masyarakat peradaban.

Spirit Publik beranggapan masyarakat sebuah Negara akan sehat jika mayoritas warga Negara benar-benar merasa hidup, menjadi bagian dan terlibat dalam berbagai masalah yang dihadapi Negara itu. Kesadaran ini akan membuat masyarakat menjadi peduli dan timbul rasa bertanggung jawab atas kejadian yang dihadapi Negara.

Spirit ini memberi motivasi pada warga Negara untuk aktif berperan serta memecahkan masalah, terlebih lagi jika ia memiliki keahlian yang dibutuhkan atau organisasi untuk memobilisasi opini dan dukungan. Seandainya pun sang warga Negara memilih pasif, spirit ini tetap memacunya untuk terus mendapatkan informasi atas masalah public yang dihadapi negaranya.

Dengan berkembangnya Spirit Publik seperti ini, kepercayaan dan kerja sama antar kelompok masyarakat lebih mudah diciptakan. Sebaliknya, jika Spirit Publik ini rendah, walau institusi kemasyarakatan tertata secara demokratis, masyarakat banyak akan tetap merasa apatis dan terasing. Lebih jauh dari itu, masyarakat tersebut dapat terfragmentasi akibat berkembangnya rasa saling tak kenal dan curiga.

Para penganjur Spirit Publik ini beranggapan bahwa Negara dan masyarakat tidak hanya terdiri dari jaringan struktur besar lembaga politik, ekonomi ataupun ke-budayaan. Masyarakat juga memiliki passion, jiwa, gelora, subyektivitas, dan motivasi yang hasil akhirnya membuat anggota masyarakat itu aktif, bertanggung jawab atau sebaliknya, dingin dan tak peduli. Karena itu, membicarakan kehidupan bernegara yang sehat tidak cukup hanya membicarakan struktur lembaga yang ada di Negara itu, tetapi harus juga membicarakan Spirit Publik masyarakat.

Kadar Spirit Publik masyarakat dapat turun naik. Debat public memberi fungsi positif bagi naiknya Spirit Publik itu. Debat public membuat masyarakat merasa memiliki masalah bersama, aktif menyampaikan pendapat dan kepentingan, serta terinformasi akan dunia pihak lain dalam masyarakat itu. Debat public menjadi cermin masyarakat untuk melihat wajah mentalnya sendiri. Jika Spirit Publik dianalogikan dengan air, debat public adalah api yang dapat menghangatkannya.

Pro dan kontra dalam debat politik atas kebijakan apapun tidak terhindari. Namun berlangsungnya debat publik itu sendiri, terlepas apa pun isi dari debat publik itu, sudah menyuntikkan energy yang dapat menggairahkan Spirit Publik.

Dua medium penting yang biasanya digunakan dalam debat publik adalah pers dan parlemen. Andil besar pers (baik media cetak ataupun elektronik) tidak hanya sebagai tempat berlangsungnya debat publik, ataupun sebagai perantara yang mengantarkan debat publik itu ke tangan pembaca di rumahnya masing-masing. Lebih dari itu, pers acapkali mendinamisir bahkan melahirkan debat public itu sendiri.

Sedangkan parlemen adalah tempat dimana debat public itu dapat diter-jemahkan ke dalam kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum. Debat public di da-lam parlemen adalah debat wakil rakyat yang sah, yang dipilih dalam pemilihan umum. Secara legal, debat itu dapat dianggap seabgai representasi dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Debat public atas kasus penjualan Indofood milik kelompok Sudono Salim sudah terselenggara secara baik di media massa. Namun debat hangat yang sama be-lum berlangsung di parlemen. Bersamaan dengan berkembangnya fungsi riil parlemen, dengan sendirinya -dan memang seharusnya- parlemen akan juga menjadi tempat debat public atas isu-isu besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dengan demikian, debat public itu tidak berhenti hanya pada debat, tetapi memberi landasan bagi adopsi ataupun modifikasi sebuah kebijakan nasional yang berkekuatan hukum.

Fungsi kedua dari debat public yang tidak kalah pentingnya adalah memini-malkan kesalahan. Setiap isu public dan kebijakan selalu berisi informasi dan kepent-ingan (interest) sekaligus. Dalam

ranah kajian kebijakan public dikenal istilah bounded rationality. Pikiran manusia, menurut konsep bounded rationality selalu terbatas, dan dalam masyarakat tidak pernah tersedia informasi yang sempurna. Akibatnya, setiap kebijakan public sejak dilahirkan sudah mengandung kelemahan, karena ia tak dapat menyerap seluruh informasi yang dibutuhkan, dan tidak dapat melayani seluruh kepentingan masyarakat yang ada.

Setiap isu public dan kebijakan, pada dirinya, dapat benar berdasarkan cara pandang tertentu, dan pada saat yang sama bisa salah berdasarkan cara pandang lainnya. Ia dapat menguntungkan segmen masyarakat tertentu, dan dapat merugikan segmen masyarakat lainnya. Akibatnya, harus ada mekanisme yang dapat memini-malkan kesalahan dan kelemahan setiap kebijakan public, terlebih lagi bagi kebijakan yang memiliki efek besar di tengah masyarakat.

Debat public adalah mekanisme efektif untuk meminimalisasi kesalahan itu. Melalui debat public sebuah isu dan kebijakan akan dianalisa dan diuji oleh berbagai sudut pandang dan kepentingan. Berbagai argumentasi dan kepentingan akan saling menelanjangi satu sama lain. Melalui debat public, sebuah isu akan dapat dimengerti secara lebih komprehensif. Cacat dan kemungkinan efek buruk sebuah kebijakan dapat diketahui lebih dini melalui debat publik.

Ambillah kasus PT. Indofood sebagai contoh. Pro dan kontra dalam debat public atas kasus itu membuat public lebih terinformasi tentang berbagai konsekuensi langkah bisnis itu, baik bagi kelompok Salim sendiri, pemerintah Indonesia, kalangan bisnis maupun masyarakat umum.

Di masa datang, debat publik seperti dalam kasus PT. Indofood di atas kita harap lebih sering terjadi. Tidak hanya pihak swasta, pemerintah pun akan mendapat manfaat atas terselenggaranya debat politik yang mencoba merespon kebijakan pemerintah sendiri.

Persoalannya, debat public yang sehat dan berguna itu hanya akan terjadi jika ada ruang kebebasan yang cukup bagi pers dan parlemen, baik dalam memilih isu ataupun sudut pandang. Tanpa kebebasan yang cukup, debat tidak akan berlangsung berdasarkan keinginan mencari kebenaran, tetapi dibuat hanya untuk menyenangkan kekuasaan. Debat jenis ini akan kehilangan dua fungsinya seperti yang telah diuraikan di atas.

Seleksi dan control tentu tetap harus dimainkan oleh pers dan parlemen atas debat public itu. Namun basis dari seleksi itu haruslah dibangun di atas motif menjaga terselenggaranya perbincangan yang rasional, dengan data dan analisa, bukan yang lainnya. Debat public pada akhirnya memang akan membuat kekuasaan semakin rasional dan membuat para pemegang kekuasaan berada dalam pengawasan public.*

Konflik Kepentingan

Para anggota DPR-RI 1997 kini sedang disorot, karena sebagian dari mereka mendapat tambahan penghasilan berupa honor jutaan rupiah untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan. Padahal mereka sudah memperoleh honor resmi dari Negara sebesar Rp 750.000,- untuk membahas sebuah RUU. Tentu saja mereka menerima gaji setiap bulan.

Tetapi kasus itu sebenarnya bukan khas Indonesia. Amerika Serikat, yang terkenal sangat ketat menjaga “kebersihan” wakil rakyat atau pejabat Negara, pernah mengalami kasus serupa. Kira-kira 90 tahun silam, tepatnya pada 1903, Senator Jo-seph Weldon Bailey mengaku mendapat tambahan keuntungan pribadi yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Ketika didesak publik mengapa bersedia menerima imbalan tambahan untuk sesuatu yang memang menjadi tugasnya, Bailey menjawab enteng. “Jika rakyat yang memilih saya menginginkan

wakil rakyat harus bersedia miskin, dengan asumsi agar saya dapat bekerja dengan baik, maka sebaiknya rakyat memilih orang lain. Saya sengaja mencari tambahan uang sebisanya secara sah, tanpa harus mengganggu dan mempengaruhi tugas saya sebagai wakil rakyat” , kata Bailey.

Kini zaman sudah berubah. Amerika Serikat telah memperkenalkan konsep baru bagi mereka yang bekerja sebagai pejabat publik, baik di legislative, yudikatif, maupun eksekutif. Itu disebut sebagai konsep konflik kepentingan (conflict of interest). Berdasarkan konsep itu, Bailey dengan mudah dituduh melanggar kode etik pejabat public atau bahkan melakukan tindak criminal korupsi, sebab telah memanfaatkan posisinya sebagai pejabat public (wakil rakyat) untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk tambahan kekayaan di luar gaji resmi.

Dalam sejarah Amerika Serikat, konsep konflik kepentingan mulai diperkenalkan seiring dengan tumbuhnya bisnis besar pada awal abad ini. Mengingat kejadian bisnis terasa begitu berkuasa dan cenderung mengeksploitasi keuntungan sebanyak-banyaknya, timbul pemikiran untuk melindungi kepentingan public dan mengimbangi pengaruh bisnis besar. Dan pemerintah dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menjaga dan melindungi kepentingan public itu.

Posisi di pemerintahan dibuat impersonal. Siapa saja yang menduduki jabatan tertentu harus melupakan kepentingan pribadi dan harus berperilaku sebagai wakil kepentingan public. Ini tentu bukan hal mudah. Seorang pejabat adalah seorang pribadi juga, yang pasti mempunyai kepentingan pribadi. Maka acapkali muncul konflik kepentingan setidaknya dalam diri para wakil rakyat, apakah sah bila mereka menerima penghasilan tambahan dari kegiatan di luar tugas sebagai wakil rakyat.

Kegiatan apa saja yang menjadi sumber penghasilan tambahan itu dan berpo-tensi menyulitkan para wakil rakyat di Amerika Serikat? Pertama, jika wakil rakyat itu memiliki sumber penghasilan di luar pemerintahan. Misalnya bekerja atau memiliki saham di sebuah perusahaan swasta. Dengan sendirinya, sang wakil rakyat itu berkepentingan membuat keputusan yang menguntungkan perusahaannya.

Kedua, jika wakil rakyat mendapat imbalan materil dari pihak swasta yang berupaya mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan public. Imbalan dapat diberikan dengan cara kasar atau halus. Yang kasar, misalnya, imbalan itu diberikan secara langsung, yakni setelah sang wakil rakyat berhasil menggolkan kepentingan pengu-saha. Yang halus, imbalan itu diberikan tersamar, misalnya sang wakil rakyat diminta memberikan ceramah di kalangan komunitas tertentu, lalu diberi honor yang sangat besar. Dengan demikian, diharapkan orang akan mengira honor itu adalah imbalan ceramah.

Maka, untuk mengontrol dan mengantisipasi hal-hal tersebut, Amerika Serikat membuat mekanisme yang membatasi kegiatan wakil rakyat. Antara lain, wakil rakyat tidak boleh bekerja atau memiliki saham di perusahaan swasta yang dapat dipengaruhi kebijakan public. Wakil rakyat juga tidak boleh menerima imbalan materi tambahan dari pihak swasta untuk pekerjaan yang memang menjadi tugasnya, seperti bersidang untuk menggolkan sebuah undang-undang.

Namun mereka boleh mendapat honor tambahan dari pekerjaan yang tidak mempengaruhi tugasnya, seperti mengajar, memberikan ceramah, atau menulis buku. Guna mengontrol agar jangan sampai honor tambahan tersebut merupakan kamufase untuk menyogok wakil rakyat, jumlah honor itu dibatasi maksimal 15% dari gaji tetapnya. Berbagai pemberian material kepada wakil rakyat, seperti hadiah ataupun ucapan terima kasih, dibatasi tidak melebihi jumlah

tertentu. Lebih dari itu, wakil rakyat diminta membuat laporan keuangan secara tertulis yang siap dievaluasi dan dicek oleh akuntan public.

Sebuah komite dapat dibentuk untuk memeriksa wakil rakyat yang dicurigai membuat laporan keuangan palsu ataupun tidak lengkap. Pers yang relative bebas siap menginvestigasi berbagai potensi korupsi ataupun pelanggaran etik wakil rakyat. Sementara itu, persaingan yang tinggi di antara wakil rakyat dan politisi di Amerika Serikat pun membuat mereka berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan jika tidak ingin karir politiknya hancur. Mekanisme yang keras itu relative berhasil mengontrol konflik kepentingan wakil rakyat di Amerika Serikat.

Agaknya mekanisme untuk mengontrol konflik kepentingan para pejabat public di Indonesia sudah harus dipikirkan dan diterapkan sebelum kepercayaan public atas lembaga Negara makin memudar.*

Prospek Demokrasi

Berbagai isu politik terus bergulir dan berakumulasi satu sama lain saat ini. Berhadapan dengan berbagai dinamika politik yang terjadi, pertanyaannya adalah mungkinkah situasi yang ada berujung pada perubahan format politik Orde Baru ke arah demokrasi?

Dalam literatur demokrasi, ada tiga pendekatan populer yang lazim digunakan sebagai alat analitis. Ketiganya dapat digunakan untuk meneropong kasus Indonesia.

Pertama, pendekatan sosio-ekonomi. Pelopor paling populer dari pendekatan ini adalah Seymour Martin Lipset (1960). Lipset menemukan korelasi yang tinggi antara kondisi ekonomi dan terbentuknya demokrasi yang stabil. Klaim Lipset ini kemudian didukung oleh berbagai penemuan dunia politik kontemporer. Semua Negara kaya yang memiliki GNP per kapita di atas US\$ 6.000 adalah Negara demo-kraasi, kecuali Negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi.

Semua Negara miskin yang memiliki GNP per kapita di bawah US\$ 450 umumnya memiliki sistem politik yang tidak demokratis, kecuali India dan Srilanka. Sedangkan Negara berpenghasilan menengah (US\$ 450-US\$ 6.000) sebagian demo-kritis dan sebagian lagi tidak demokratis.

Kedua, pendekatan konflik, yang dipelopori Dankwar A. Rustow (1970). Rustow tidak mencari kondisi yang dibutuhkan demokrasi, tetapi sebab musabab la-hirnya demokrasi. Setelah tercipta integrasi nasional, klaim Rustow, demokrasi akan dilahirkan oleh tumbuhnya oposisi dan konflik kepentingan dikalangan elit. Para elit itu tidak harus meyakini demokrasi sebagai ideology. Fragmentasi dan konflik kepentingan diantara elit itu sendiri yang akan mentransformasikan sistem. Dalam konflik ini berbagai elit akan mencari dukungan di kalangan non-elit. Demokrasi ada-lah buah dan solusi untuk mengakomodasi dan menyatakan kepentingan elit, dengan mengubah konflik menuju kompetisi.

Ketiga, pendekatan kultur yang dipelopori Almond dan Verba (1963). Dalam risetnya, mereka menemukan tumbuhnya insting tertentu di Negara demokratis, yang kemudian mereka namakan civic culture. Oleh para pendukungnya, konsep civic cul-ture ini dikembangkan sebagai kondisi yang dibutuhkan demokrasi, seperti sikap politik yang moderat, toleransi akan perbedaan dan pluralitas, kepercayaan atas insti-tusi Negara, sikap kritis atas informasi, dan social trust diantara anggota masyarakat. Pendekatan ini melihat demokrasi bukan buah konflik elit, melainkan sebagai way of life. Agar demokrasi stabil, mayoritas masyarakat tidak cukup hanya memiliki kepentingan berbeda, melainkan juga harus menghayati civic culture itu.

Harold Crouch (1994) mencoba menerapkan ketiga pendekatan itu dalam mengamati prospek demokrasi di Indonesia. Dengan memadukan ketiga pendekatan itu, Crouch sampai pada sikap

pesimistis atas kemungkinan demokrasi di Indonesia pada 1990-an. Dari sisi sosio-ekonomi, menurut Crouch, pengusaha besar yang terbentuk di Indonesia sulit untuk membawa program politik yang berbeda dengan pemerintah. sebagian besar adalah pengusaha non-pribumi yang sangat minoritas dan tidak memiliki akar tradisi politik kritis. Sedangkan pengusaha pribumi yang tumbuh subur ternyata dekat bahkan keluarga dari pihak kekuasaan. Mereka tidak berkepentingan mentransformasikan kekuatan bisnis untuk membuat perubahan atas sistem yang menguntungkan mereka sendiri. Kelompok bisnis di luar dua kelompok di atas, kelas menengah lain ataupun kelompok buruh, belum banyak dan tidak cukup kuat untuk memimpin perubahan.

Dari pendekatan konflik elit, situasi Indonesia juga tidak krusial. Crouch mencatat banyaknya studi yang ingin menggambarkan konflik elit di tubuh militer, misalnya konflik antara militer garis keras dan moderat, Jawa dan non-Jawa, Angkatan 45 dan Angkatan Magelang divisi Diponegoro dan divisi lainnya, pragmatis dan principal, atau konflik militer dan kelompok pemerintah nonmiliter. Namun, bagi Crouch, konflik ini tidak cukup untuk mengubah sistem, terutama karena kemampuan politik Presiden Soeharto yang menjadi penyekat dan penyatu, yang berhasil menyeimbangkan kepentingan elit di sekitarnya.

Pendekatan kultur adalah paling lemah dalam meneropong prospek demo-kritisasi di Indonesia. Konsep kekuasaan Jawa yang banyak menjadi bahan studi In-donesianist bukan saja tidak paralel dengan kultur demokrasi, melainkan juga banyak bertentangan. Sementara itu, kultur modern (world culture), yang dibawa oleh pembangunan ekonomi dan pendidikan ala Barat masih berupa selimut tipis yang tidak berakar dalam kesadaran public.

Dalam pandangan Crouch, fondasi socio-ekonomi, politik, dan kultur belum memberikan prospek cerah bagi demokrasi di

Indonesia tahun 1990-an. Sistem demokrasi ataupun semidemokrasi akan goyah dan labil dalam kondisi Indonesia seperti itu.

Benarkah fondasi sosio-ekonomi, politik, dan kultur saat ini tidak menye-diakan gambaran yang prospektif bagi perkembangan demokrasi? Bagi pemikir post-modernis, realitas kekuasaan lebih bersifat tidak pasti, misterius, dan penuh unsur surprise, tidak seperti diduga pengamat politik konvensional. Dalam realitas politik praktis, tidak semua informasi tersedia secara terang benderang, dan posisi setiap ac-tor selalu goyah, dapat ke kanan atau ke kiri, tergantung situasi politik yang selalu mungkin berubah.

Setahun sebelum bubarnya Uni Soviet, tak ada pengamat politik yang dapat menduga bahwa “kerajaan” besar komunisme tersebut akan bubar secepat itu. Sebe-lum 1980-an, pengamat mana yang menduga agama akan kembali memainkan peran politik yang berpengaruh bahkan di negeri paling bebas dan sekuler, seperti di Amerika Serikat? Bagi kaum postmodernist, dua kejadian besar ini menjadi insight betapa realitas politik itu lebih kompleks dan misterius dari apa yang dapat dikon-struksi oleh kerangka politik konvensional.

Berbeda dengan Crouch, bagi kaum postmodernist, demokrasi di Indonesia dengan sendirinya dapat ditegakkan kapan pun, tergantung permainan politik dan berbagai kebetulan yang tidak sepenuhnya dapat diduga. Dukungan dan loyalitas politik selalu goyah dan acap berubah. Sejarah menyediakan banyak cerita betapa pe-rubahan posisi politik tidak dapat terduga. Disamping itu, kondisi sosio-ekonomi dan sosio-kultur bukanlah prasyarat pokok bagi demokrasi.

Posisi kita berada di tengah dua ekstrem di atas. Di satu sisi, saya mengakui kekuatan analisis Harold Crouch dalam melihat masih tipisnya fondasi social-ekonomi dan sosio-kultur bagi pertumbuhan

demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, saya pun melihat adanya kebenaran dalam cara pandang kaum postmodernist yang membuka kemungkinan demokratisasi yang substansial di Indonesia akibat bekerjanya sebab akibat yang tidak sepenuhnya dapat dipahami dan diduga. Sebagai akademikus yang berpretensi bebas nilai, saya cenderung memihak Crouch. Tapi, sebagai aktivis yang romantis, hati ini lebih di kalangan postmodernist.*

Kepentingan Publik

Para politikus, pengusaha, dan aktivis di Indonesia yang antimonopoli boleh mendengar Janet Reno. Akhir Oktober 1997, melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang dipimpinnya, Reno meminta Pengadilan Distrik di Negeri Pa-man Sam itu mengenakan denda US\$ 1 juta (saat itu setara dengan Rp 3,5 milyar) pe hari kepada perusahaan software terbesar di dunia, Microsoft. Ini adalah denda terbanyak yang pernah diminta divisi antitrust departemen itu sepanjang sejarah.

Berhari-hari kasus ini menjadi laporan utama media massa Amerika Serikat karena keunikannya. Ini ceritanya. Melalui kompetisi bebas, Microsoft menguasai pasar software computer. Sebanyak 70% konsumen pemakai personal computer (PC) menggunakan sistem operasi Windows 95, yang diproduksi Microsoft. Di era internet dan e-mail, Microsoft juga memproduksi Internet Explorer sebagai sistem untuk men-jelajahi dan mengeksplorasi kekayaan informasi yang disediakan dunia internet itu.

Persoalannya, Microsoft hanya bersedia menjual Windows 95, jika perusahaan yang sama memasukkan program Internet Explorer itu ke dalam program Windows 95. Otomatis, konsumen Windows 95 yang sangat dominan itu juga akan memiliki Internet Explorer.

Di Indonesia persyaratan ini mungkin akan menjadi persoalan strategi pemasaran biasa. Sepintas memang tidak ada yang salah dengan strategi penjualan itu. Toh Microsoft tidak melarang perusahaan lain melakukan hal yang sama, dan tidak memaksa publik membeli. semuanya masih dalam aturan kompetisi bebas dan mekanisme pasar.

Namun di Amerika Serikat, yang sangat sensitive dengan monopoli, hal itu menjadi lain. Microsoft dianggap melakukan sejenis gerakan bawah tanah untuk me-matikan saingannya. Dunia internet selama ini dikuasai perusahaan lain, Netscape. Dua dari tiga pengguna internet selama ini memakai Netscape. Jika Internet Eksplorer dari Microsoft dapat diperoleh secara otomatis dengan membeli Windows 95, Netscape akan hilang dari pasaran. Pembeli Windows 95 yang jumlahnya sekitar 70% dari pemakai PC, tidak akan merasa perlu lagi membeli Netscape, karena program yang kurang lebih sama (Internet Explorer) sudah tersedia dalam Windows 95.

Lalu mengapa Pemerintah Amerika Serikat harus terlibat dalam persaingan bisnis antara dua perusahaan raksasa itu? Mengapa pemerintah harus peduli dengan adanya satu pihak yang akan sangat menguasai pasar dan pihak lain yang akan mati? Bukankah semuanya terjadi dalam persaingan bebas, dan pemerintah tidak membuat diskriminasi? Bukankah Microsoft menjadi superior bukan lantaran proteksi pemerintah ataupun lisensi khusus, melainkan sepenuhnya karena pilihan bebas konsumen sendiri?

Ilmu politik menyediakan satu jawaban untuk itu, yaitu konsep kepentingan public (public interest). Konsep ini mengusung

keyakinan bahwa kepentingan public akan terlayani dengan lebih baik jika situasi kompetisi di segala bidang terpelihara. Jika ada satu pihak terlalu dominan menguasai pasar, walau itu diperoleh melalui kompetisi bebas, dominasi itu dianggap berbahaya bagi kepentingan publik. Pemerintah sebagai penjaga kepentingan public diwajibkan menetralkan dominasi itu melalui seperangkat regulasi dan serangkaian ketentuan hukum.

Konsep kepentingan public ini dalam sejarah Amerika Serikat mulai dipopulerkan sejak awal abad ini, antara lain oleh Theodore Roosevelt dan Water Lippman. Konsep ini menganggap bahwa dalam sebuah komunitas ada kepentingan sama yang dimiliki setiap individu sebagai anggota komunitas itu. Secara umum, kepentingan itu dirumuskan sebagai peningkatan kesejahteraan bersama berdasarkan aturan main yang kompetitif dan fair. Musuh utama yang dihadapi adalah bisnis besar yang berkecenderungan monopolistik dan antikompetisi.

Menurut konsep ini, Microsoft sudah antikompetisi. Microsoft, yang menguasai pasar sebanyak 70% dalam sistem operasi Windows 95, dianggap sudah berada dalam posisi mendekati monopoli. Melalui dominasi ini, Microsoft sudah mampu menekan pembeli untuk juga menggunakan produk Microsoft lainnya jika ingin mendapatkan Windows 95.

Dominasi Microsoft dianggap merugikan kepentingan public karena sedikitnya dua alasan. Pertama, pilihan dan kebebasan publik untuk memilih akan semakin terbatas. Public makin mudah diarahkan, karena Microsoft pemilik eksklusif sebuah produk yang memang sangat dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan sistem operasi Windows 95.

Kedua, karena tidak lagi memiliki saingan berarti, Microsoft tidak lagi dipaksa pasar untuk menciptakan produk dengan metode yang

seefisien mungkin. Padahal kompetisi ketat dapat membuat public mendapatkan produk yang lebih murah atau lebih berkualitas.

Microsoft pun kini diserang dari berbagai penjurur agar menghentikan berbagai upaya untuk memanfaatkan posisi dominannya dalam sistem operasi Windows 95. Para senator di Kongres, misalnya Ted Stevens dan Craig Thomas, melayangkan surat ke Federal Trade Commission untuk membuat penyelidikan atas startegi bisnis Microsoft yang anti kompetisi tersebut. sementara itu, lembaga konsumen berpengaruh pimpinan Ralph Nader, Consumer Project on Technology, membentuk opini publik dan memberi tekanan kepada divisi antitrust dipemerintahan untuk ber-tindak. Pers pun tidak ketinggalan bersuara. Terbentuk suatu koalisi sukarela yang ingin melindungi kepentingan public untuk mendapatkan suasana kompetisi dan hak memilih.

Konsep kepentingan public itu agaknya perlu juga dipopulerkan di Indonesia agar makin mudah menumbuhkan kultur antimonopoly.*

Sanksi Ekonomi Untuk Hak Asasi ?

Menjelang hari hak asasi manusia pada 10 Desember 1997, Human Rights Watch, lembaga hak asasi manusia, mengeluarkan laporan tahunan berjudul World Report 1998. Untuk periode Desember 1996 sampai November 1997 lembaga ini mengamati 65 negara.

Banyak isu diangkat dalam laporan itu, mulai dari yang konseptual, seperti tantangan pemimpin dari Asia yang menolak universalitas konsep hak asasi manusia, sampai yang praktis seperti pelanggaran hak asasi di Bosnia dan Rwanda. Laporan ini juga memberikan berbagai catatan dan harapan atas komisi hak asasi PBB, lembaga dunia yang seharusnya paling aktif mempromosikan agenda hak asasi ke seluruh bumi.

Satu isu penting yang diangkat laporan ini, walau hanya sekilas, adalah konflik antara promosi hak asasi dan kepentingan ekonomi berbagai Negara besar. Dengan nada kecewa, diceritakan bagaimana Negara superpower seperti Amerika Serikat acapkali menarik

komitmennya atas hak asasi jika kepentingan ekonomi Negara itu menjadi taruhannya. Kebijakan yang selektif terhadap Cina, menurut laporan ini, adalah contoh yang paling penting dan hangat. Cina dikenal sebagai satu Negara yang paling banyak melanggar hak asasi manusia. Namun Amerika Serikat menolak memberikan sanksi ekonomi untuk menekan Cina memperbaiki rapor hak asasinya.

Sanksi ekonomi, seperti pembatasan perdagangan, embargo atau pengurangan bahkan penghapusan bantuan dana luar negeri, sejak dua decade ini telah dijadikan senjata ampuh untuk promosi hak asasi. Dalam merespon berbagai kasus hak asasi di dunia, termasuk di Indonesia, sering terdengar para aktivis hak asasi berharap kekuatan internasional menggunakan senjata sanksi ekonomi itu.

Tulisan itu membuat perenungan seputar perdebatan daya guna sanksi ekonomi untuk promosi hak asasi. Dari perdebatan itu, dapat dimengerti mengapa berbagai Negara besar mulai tidak tertarik menggunakan isu perdagangan dan sanksi ekonomi untuk memaksa diterapkannya hak asasi, seperti yang ditulis World Report 1998. Senjata yang baru harus dicari.

Pihak yang mendukung diterapkannya sanksi ekonomi untuk promosi hak asasi bersandar pada tiga alasan

Pertama, pelanggar hak asasi kini dianggap bukan lagi hanya menjadi masalah nasional tapi masalah komunitas internasional. Berbagai komunitas internasional sah-sah saja membuat aksi mengurangi ataupun mencegah pelanggaran hak asasi di manapun. Intervensi atas kedaulatan sebuah Negara yang melanggar hak asasi dapat dibenarkan, karena kedaulatan manusia dianggap lebih tinggi harganya daripada kedaulatan Negara. Dengan kata lain, kedaulatan Negara dapat dikalahkan oleh tindakan yang ingin mengembalikan kedaulatan yang lebih tinggi, yaitu kedaulatan manusia.

Lahirnya deklarasi universal hak asasi manusia setelah Perang Dunia Kedua menandai era baru itu. Dunia tidak lagi harus dipandang sebagai wilayah yang ter-pilah-pilah oleh Negara nasional yang saling berdaulat dan saling tidak boleh meng-ganggu. Di balik tembok Negara nasional itu, ada manusia yang sama di seluruh dunia, yang berhak untuk dihormati hak-haknya, sebagaimana yang dijamin oleh deklarasi universal hak asasi manusia itu.

Kedua, pemerintah yang melanggar hak asasi tidak dapat diharapkan mengu-bah tindakannya jika tidak ditekan atau dikontrol oleh kekuatan di luarnya. Dengan demikian perbaikan hak asasi sudah mengandaikan harus hadirnya kekuatan yang terus-menerus menekan dan mengontrol perilaku pemerintahan. Persoalannya, di Negara Dunia Ketiga umumnya-tempat pelanggaran hak asasi yang terbanyak-kekuatan masyarakat masih terlalu lemah untuk mengontrol pemerintahan. Bagaimana mungkin kekuatan masyarakat yang lemah itu akan didengar dan diperhatikan.

Masyarakat internasional akan jauh lebih efektif menekan sebuah pemerinta-han nasional. elemen terpenting dari masyarakat internasional itu adalah PBB dan Amerika Serikat yang kini menjadi satu-satunya superpower. Intrevensi kekuatan in-ternasional itu untuk hak asasi menjadi sangat vital.

Ketiga, kekuatan internasional itu harus menggunakan senjata yang efektif agar sebuah pemerintahan nasional dapat tunduk. Menurut pandangan ini, tekanan diplomatic dan teguran belaka tidak akan mengubah sebuah rezim yang anti-hak asasi. Sementara intervensi militer dianggap terlalu keras dan tidak lagi pas dengan alam rasa modern yang semakin antibedil dan darah. Maka pilihan jatuh pada sanksi ekonomi sebagai senjata ampuh.

Menurut pandangan ini, bagaimanapun sebuah rezim yang antihak asasi tetap berkepentingan menjaga dan meningkatkan

kemakmuran Negara nasional. semakin makmur negara yang ia pimpin, semakin kuat pula legitimasi regim itu untuk terus memerintah. Untuk mendapatkan kemakmuran itu, bantuan luar negeri dan perdagangan internasional dibutuhkan. Masyarakat internasional dapat menggunakan senjata yang dibutuhkan oleh regim itu untuk menekan regim itu sendiri.

Tidaklah heran jika penganut pandangan ini akan kecewa membaca laporan hak asasi manusia yang ditulis dalam World Report 1998 itu. Berbagai negara besar yang diharapkan menjadi pelaku utama sanksi ekonomi malah semakin ragu dan tidak berkenan menggunakan senjata itu untuk menekan.

Berbagai negara besar tentunya punya alasan yang penting mengapa sanksi ekonomi semakin tidak dipilih untuk promosi hak asasi. Mereka, para penentang sanksi ekonomi untuk hak asasi, juga memiliki tiga alasan.

Pertama, perdagangan bebas oleh individu di berbagai Negara adalah bagian dari hak asasi itu sendiri. Seorang individu, di mana pun ia berada, baik di Negara demokrasi atau di Negara pelanggar hak asasi, mempunyai hak untuk berdagang secara bebas berdasarkan prinsip sukarela. Perdagangan secara bebas itu adalah jalan yang layak bagi individu untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya.

Sanksi ekonomi seperti pembatasan perdagangan dan embargo akan membat-asi hak-hak individu itu dalam berdagang secara bebas. Sanksi ekonomi untuk hak asasi menjadi kontradiksi pada dirinya sendiri: mempromosikan sebagian hak asasi dengan cara melanggar hak asasi yang lain. Atas nama konsistensi sanksi ekonomi itu tidak bisa diterima.

Kedua, banyak bukti yang memperlihatkan bahwa sanksi ekonomi hanya efektif menurunkan kemakmuran ekonomi Negara target, namun tidak cukup kuat untuk mengganti regim yang memerintah atau memaksa regim itu mengubah ke-bijakannya. Turunnya kemakmuran acapkali justru paling diderita oleh masyarakat yang sudah miskin. Sedangkan regim yang melanggar hak asasi itu umumnya kaya raya dan tidak banyak terganggu oleh menurunnya kemakmuran nasional. sanksi ekonomi dianggap akan menembak korban yang seharusnya dilindungi.

Irak dan Iran adalah contoh yang paling actual. Berbagai sanksi ekonomi yang diterapkan kepada dua negara itu memang dapat melukai kemakmuran nasional. Na-mun regim yang memerintah tetap bercokol di singgasana karena terlalu kuat untuk diganggu oleh sanksi ekonomi. Di Irak, kesehatan publik dan pendapatan per kapita memang turun drastic. Tetapi Saddam Hussein masih berdiri tegar.

Ketiga, sanksi ekonomi dianggap justru merusak penerapan hak asasi dalam jangka panjang. Bagaimanapun, penerapan hak asasi jauh lebih efektif jika ia didukung oleh berbagai kekuatan civil society domestic negara yang bersangkutan. Berbagai kekuatan masyarakat itu justru akan tumbuh jika ekonomi nasional negaranya turut tumbuh. Bersamaan dengan gerak kemajuan ekonomi nasional, berbagai lapisan menengah yang terdidik akan semakin banyak dan mandiri secara ekonomi. Lapisan inilah yang akan menjadi penjaga hak asasi.

Sanksi ekonomi justru memperlambat lahirnya kekuatan masyarakat itu. Jika ingin konsisten dengan tumbuhnya lapisan menengah secara cepat untuk mempro-mosikan hak asasi bukan sanksi ekonomi yang harus dipilih. Sebaliknya, bantuan ekonomi dan kontak perdagangan internasional yang justru harus digalakkan. Cina, Indonesia atau Negara manapun tempat yang dikritik banyak

melanggar hak asasi justru harus banyak dibantu secara ekonomi dan dirangsang untuk terus terlibat dalam perdagangan internasional, bukan sebaliknya.

Dua kumpulan argument di atas sungguh pun sama-sama ingin memper-juangkan hak asasi manusia, namun punya sikap yang berbeda bahkan bertentangan atas daya guna sanksi ekonomi untuk promosi hak asasi manusia. Tidak mengherankan jika penganut dua pandangan itu akan memiliki respons yang berbeda atas laporan hak asasi tahun ini. Melemahnya komitmen Negara besar menggunakan sanksi ekonomi bagi promosi hak asasi oleh penganut yang satu dianggap berita buruk, namun oleh penganut lainnya merupakan berita gembira.

Jalan tengah dapat diambil. Argument pihak yang menentang sanksi ekonomi bagi promosi hak asasi terlalu kuat untuk ditolak. Namun benar pula kiranya bahwa pemerintah nasional yang melanggar hak asasi perlu terus ditekan dan dikontrol. Jika intervensi militer telah lama ditolak dan sanksi ekonomi juga semakin ditinggalkan, senjata ampuh apakah yang tersisa bagi masyarakat internasional untuk menekan regim yang antihak asasi?

Satu jawabnya adalah jaringan publikasi. Tekanan terhadap sebuah regim yang antihak asasi dapat mengambil bentuk berupa publikasi media massa yang menyerang citra regim itu secara terus menerus. Dalam era globalisasi informasi dan mendunianya teknologi komunikasi, serangan berupa berita-berita buruk sebuah regim akan cukup mengganggu. Sementara pemerintahan Negara lain dapat melengkapi serangan itu dalam bentuk tekanan diplomatic.

Namun serangan terbesar yang akan dihadapi oleh regim yang antihak asasi pada akhirnya adalah kemajuan ekonomi negara itu sendiri. Kemajuan ekonomi negara itu sendiri yang pada akhirnya

membuat pelanggaran hak asasi semakin dis-fungsional dan tidak cocok dengan mekanisme ekonomi dan politik yang rasional. Jika pandangan ini benar, maka perjuangan hak asasi dalam jangka panjangnya akan mengambil jalan sedikit menikung, yaitu mempromosikan hak asasi dengan jalan memakmurkan ekonomi masyarakat.*

BAB II

Isu Paradigma dan Kultur

Mengendalikan Politisi Agama

Kita di Tanah Air dapat belajar banyak dari kasus Turki. Ketegangan politik di Turki memiliki pesan yang melampaui teritori Turki sendiri mengenai dilemma sistem demokrasi dan kebangkitan politik Islam.

Seperti yang diberitakan oleh US News & World Report (17 Maret 1997), Er-bakan, Perdana Menteri Turki yang pertama dari partai politik yang berlandaskan Islam saat ini, mendapat tekanan keras dari pihak militer. Erbakan diduga secara perlahan akan mengubah politik Turki ke arah pemerintahan Islam model Iran dengan memanfaatkan kecenderungan sentimen Islam yang semakin menguat di masyarakat. Pihak militer ingin menghentikan kemungkinan ini dan tetap setia pada sistem politik Turki yang demokratis, plural, dan sekuler, sebagaimana yang didirikan oleh Kemal Ataturk sejak 1923.

Dengan ultimatum sebanyak 20 points, para puncak pimpinan militer Turki menekan Erbakan untuk menghentikan hubungan yang

hangat dengan Iran dan menghentikan toleransinya atas berbagai atribut Islam yang mulai memasuki wilayah publik yang seharusnya sekuler.

Yang membuat kasus Turki menjadi penting adalah kompleksitas persoalan yang menjadi latar belakang peristiwa di atas. Sebagai Negara yang semakin demokratis dan ingin menjunjung kebebasan berserikat, Turki member saluran dan mengakomodasi berbagai aliran politik, termasuk politik Islam ke dalam mainstream politik, agar mainstream politik yang demokratis itu semakin diterima dan mengakar. Yang terjadi kemudian politik Islam itu menguat serta berpotensi mengubah sistem politik Turki yang demokratis dan sekuler itu sendiri.

Bagi pembela demokrasi kasus Turki mengangkat kembali dilema sistem demokrasi. Yaitu bagaimana seharusnya mengakomodasi berbagai politik kepentingan dan aliran di masyarakat, namun tetap menjaga agar politik kepentingan dan aliran itu tidak cukup kuat untuk menggoyahkan sistem besar demokrasi yang plural itu?

Sebagaimana Indonesia, Turki dihidupi oleh dua peradaban besar yang terus tumbuh dan berinteraksi: peradaban Barat dan Islam. Kemal Ataturk adalah peletak kebudayaan Barat yang terpenting di Turki modern. Ia mengubah politik Islam di Turki yang diwarisi dari Otoman Empire menjadi politik nasional demokratis seperti di Barat dengan berbagai kebijakan yang radikal.

Di tingkat eksekutif dan legislatif, Ataturk menghapuskan kesultanan dan kekhalifahan Islam di tahun 1924, menghapuskan kementerian, pengadilan dan berbagai gelar keagamaan, mengadopsi sistem hukum sekuler dari Swiss di tahun 1926 dan mendeklarasikan Turki sebagai Negara republik yang sekuler dalam amandemen konstitusi tahun 1937 (Gole, 1997).

Lebih jauh dari itu, negara juga mengubah pendidikan nasional yang bercorak keagamaan menjadi pendidikan model barat sejak tahun 1926. Huruf resmi berbahasa Arab juga diubah menjadi berbahasa Latin di tahun 1928. Bahasa nasional Turki dibersihkan dari pengaruh Persia dan Arab, dan menjaga purifikasi bahasa ini dengan mendirikan Turkish Linguistic Society pada tahun 1932. Bahkan panggilan sembahyang diganti dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Emansipasi wanita digalakkan dengan mengaktifkan mereka ke dunia publik (Gole, 1997).

Kebijakan ini membuahkan semakin mengakarnya nasionalisme yang sekuler dalam kesadaran public di Turki. Berbagai survey tentang public opinion di Turki membuktikannya. Di tahun 1960-an atas pertanyaan survey : "Siapakah kamu?" . 50,3 persen pekerja di pabrik tekstil mengidentifikasi diri sebagai "Turki" . Dan 37,5 persen sebagai "Muslim" . Pertanyaan yang sama diulangi lagi di tahun 1994 dan hasilnya 69 persen mengaku "Turki" , 21 persen mengaku sebagai "Muslim Turki" dan 4 persen menyebut hanya "Muslim" .

Dalam survey yang dilakukan tahun 1986 hanya 7 persen dari sampel nasional yang berpendapat bahwa Turki harus berlandaskan hukum Islam (Heper, 1997). Namun bagaimanapun peradaban Islam sudah lebih lama mengakar di Turki. Kecenderungan Islamisasi terus hidup justru dengan menggunakan atribut modern dan juga dihasilkan oleh pendidikan Barat yang modern.

Gole (1997) mencatat tiga kelompok utama yang menjadi pemicu Islamisasi dalam dunia public di Turki.

Pertama, adalah kaum intelektual Islam yang banyak diinspirasi oleh pemikir Islam dunia seperti Mawdudi, Sayyid Qutub dan Ali Shariati. Para intelektual ini mempengaruhi opini umum melalui berbagai media tentang politik Islam sebagai alternatif dari demokrasi Barat.

Kedua, adalah para terdidik dari ilmu alam. Posisi mereka sangat penting da-lam masyarakat karena merekalah yang menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi dan industry.

Ketiga, adalah kaum wanita-profesional. Melalui gerakan jilbab para wanita membawa symbol Islam ke dunia politik. Jilbab yang mereka gunakan berfungsi sebagai penegasan identitas atas way of life masyarakat Turki yang semakin Barat dan sekuler.

Sudah sejak 1923 sistem politik Turki dibangun berdasarkan landasan peradaban Barat yang demokratis, plural dan sekuler. Benard Lewis (1993) yang melakukan penelitian empiris tentang Islam dan demokrasi, mengklaim dari 46 negara ber-mayoritas penduduk Islam, turki adalah satu-satunya yang dapat dikategorikan se-bagai demokratis dalam pengertian Barat.

Apakah demokrasi sekuler diTurki akan bertahan menghadapi kebangkitan politik Islam masa kini? Literature mutakhir tentang demokrasi tidak lagi menekankan variabel "pembangunan ekonomi" atau "kultur" untuk menjaga stabilitas demokrasi itu, tetapi menegaskan peran elit. Transaksi para elit itulah yang paling menentukan bulat lonjongnya sistem politik. Sistem demokrasi ini akan terus mengalami konsolidasi jika para elit yang bertarung dalam politik tetap sepakat menjadikan demokrasi itu sebagai satu-satunya prosedur yang disepakati dan dipertahankan.

Pihak militer di Turki mencurigai Erbakan, Perdana Menteri Turki dari kelompok Islam, tidak setia kepada sistem demokrasi sekuler yang didirikan Kemal Ataturk. Dalam bahasa Juan J. Linz, Erbakan tidak ingin menjadikan democracy as the only game in town. Erbakan dianggap menggunakan taktik yang berbahaya. Yaitu berjanji setia kepada sistem demokrasi sekuler ketika posisinya masih lemah, namun ketika menguat ia mulai memainkan sentiment Islam masyarakat untuk mengubah sistem politik Turki ke arah Negara

Islam. Permainan ini dianggap dapat membawa Turki kembali pada konflik mendasar mengenai dasar-dasar Negara yang secara tajam dapat memecah-mecah para elit. Konflik ini akan semakin dalam karena ia bertopang pada konflik dua peradaban.

Di tingkat konsep, konflik di atas sebenarnya dapat diselesaikan jika berbagai elit yang bertarung membedakan secara tegas antara peran negara dan peran komunitas. Prinsip-prinsip keagamaan setiap agama menjadi benar jika diterapkan dalam komunitas agama itu sendiri, namun menjadi problematic jika diterapkan kepada negara yang memiliki komunitas yang beragam.

Karena menaungi komunitas yang beragam, Negara modern memang diharapkan netral terhadap keberagaman keyakinan itu. Agar dapat netral atas keberagaman agama dan keyakinan, negara itu sendiri memang tidak diharapkan menjadi instrument agama tertentu dan tidak disakralkan. Dengan kata lain ia memang harus dibuat sekuler.

Yang berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip agama adalah komunitas agama itu sendiri (dan para pemeluknya), bukan Negara. Negara hanya berkewajiban menjalankan prinsip moral umum yang disepakati oleh semua agama seperti pemerintahan yang bersih, pemimpin yang berintegritas dan kehendak baik.

Pemisahan yang tegas antara peran negara dan peran komunitas dapat menghindari dua hal yang sama buruknya. Pertama adalah politisasi agama, yang memanipulasi sentiment agama dalam rangka kekuasaan. Kedua, agamanisasi politik yang mengagamakan politik. Politik yang seharusnya fleksibel dan bersifat publik yang plural akan menjadi sacral, monopolitik dan personal. Akibatnya, kesalahan politik akan sulit dikoreksi.

Politisasi agama adalah memindahkan agama yang seharusnya ada pada wilayah komunitas ke wilayah negara. Politisasi agama dengan demikian harus menjadi musuh agama dan sekaligus musuh politik.*

Kerusuhan

Bagaimana menjelaskan meluasnya kerusuhan yang mewarnai pemilu 1997 di Indonesia? Kebrutalan massa, perkelahian dan perusakan properti terjadi di berbagai tempat, mulai dari ibukota Negara Jakarta sampai ke Irian Jaya.

Padahal kompetisi partai politik di Negara kita tidak cukup tinggi. Tidak ada perbedaan yang tajam dalam program dan visi partai. Partai politik belumlah berkem-bang menjadi kendaraan politik untuk memperjuangkan sebuah ideology pembangunan. Berbeda dengan Negara lain, partai politik disini sudah terhindar dari kon-flik ideologis. Partai politik juga sudah terhindar dari konflik nominasi kepemimpinan nasional, karena hampir dapat dipastikan berbagai peserta pemilu yang ada akan mengajukan nama yang sama.

Namun mengapa proses pemilu menjadi lebih rusuh? Berbagai analisis dan spekulasi dapat diberikan, mulai dari kesenjangan ekonomi, konspirasi elit politik, sampai isu manuver penganut agama

tertentu. Kolom ini mengelaborasi perspektif lain, yang tengah populer dalam literatur ilmu politik, yaitu pendekatan kultural yang menekankan apa yang diistilahkan dengan level of trust (Inglehart, 1988, dan Fukuyama, 1995).

Inglehart menggunakan istilah itu untuk menjelaskan stabilitas demokrasi di berbagai Negara Eropa. Fukuyama menggunakannya untuk menjelaskan turun-naiknya kemakmuran Negara. Sedangkan kita memakainya untuk menjelaskan kerusuhan pemilu.

Apa itu level of trust dan mengapa ia penting? level of trust adalah rasa percaya dan rasa nyaman masyarakat dalam melihat perbedaan pandangan di antara mereka (sesama kelompok politik yang bersaing) dan dalam menghormati institusi politik yang ada (legitimasi atas pemerintahan yang tengah berkuasa).

level of trust ini misalnya mempertanyakan seberapa jauh kelompok yang bersaing tetap terikat pada komitmen dan kepentingan bersama, sehingga perbedaan tidak harus menjadi permusuhan yang ingin saling memusnahkan, dan kompetisi tidak harus menjadi konflik yang berujung pada kekerasan.

Umumnya warga percaya bahwa siapapun yang memenangkan kompetisi tetap terikat pada aturan main yang terbuka dan equal bagi semua. Dalam perbedaan yang ada, umumnya warga juga percaya bahwa tetap hadir ruang bersama yang dapat menjadi landasan bagi kerja sama antar kelompok yang berbeda dan beragam.

level of trust juga mempertanyakan seberapa jauh sistem dan institusi pemerintahan yang ada mewakili rasa keadilan masyarakat. Umumnya warga percaya bahwa kekuasaan yang dipinjamkan ke pemerintahan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum dengan memperhatikan kaidah-kaidah moral, hukum, dan hak asasi. level of trust ditandai oleh adanya rasa percaya kepada integritas pemimpin.

Makin tinggi level of trust dalam kesadaran public, makin stabil dan damai masyarakat itu. Rasa percaya yang tinggi atas institusi negara dan kelompok politik membuat kerukunan lebih mudah digalang, lebih harmonis dan masyarakat makin produktif karena makin rendahnya konflik dan kekerasan. Pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan yang dipercayai publiknya. Kompetisi politik yang sehat adalah jika para peserta percaya pada aturan main dan niat baik setiap peserta.

Rendahnya level of trust berhubungan langsung dengan perasaan terancam dan rasa dizalimi (diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang). Ujung dari perasaan itu adalah aksi protes, kekerasan, dan kemarahan kolektif. Bagaimana dapat nyaman jika kita merasa bahwa kelompok politik yang bersaing atau institusi pemerintahan yang ada hendak menzalimi kita?

Berdasarkan perspektif ini, sebuah hipotesis dapat ditarik untuk menjelaskan kerusuhan pemilu. Secara hipotesis kita katakan, kerusuhan pemilu itu disebabkan menurunnya level of trust masyarakat, baik ke sesama kelompok politik yang bersaing maupun ke institusi pemerintahan, di saat suhu politik justru meningkat karena pemilu. Akibatnya, peristiwa pemilu dijadikan panggung untuk mengekspresikan rasa ketakutan, ketidakpuasan, dan kemarahan kolektif itu. Berbagai picu dengan mudah menyalurkan perasaan itu menjadi kerusuhan dan kekerasan.

Berbagai peristiwa dua tahun ini menguatkan perkiraan bahwa level of trust di masyarakat kita sedang menurun drastis. Kewibawaan institusi pemerintahan terganggu, antara lain, oleh kasus Eddy Tansil, kolusi di Mahkamah Agung, kasus Meg-awati, meluasnya korupsi, serta nepotisme anak-anak pejabat dalam bisnis. Sedangkan harmoni antar kelompok masyarakat terganggu oleh berbagai kasus pembakaran rumah ibadah, pertokoan, dan isu-isu rasial serta sektarian yang makin meluas dan berdarah.

Jika hipotesis tersebut benar, maka kerusuhan itu hendak menyatakan bahwa banyak hal yang masih menghadang untuk membuat kita saling percaya sebagai se-buah bangsa. Tentu ini sebuah peringatan yang pilu.*

Memperbarui Kultur Konflik

Seorang aktivis politik setengah baya, sebut saja Mr. X yang terdidik dan tumbuh di Negara demokrasi modern, datang berkunjung ke Indonesia dan tinggal di Jakarta sejak Januari 1996. Ia tidak banyak tahu tentang kondisi dan kultur politik Indonesia. Namun karena minatnya yang besar dan bisa berbahasa Indonesia, ia membaca berbagai peristiwa politik yang tengah hangat di Tanah Air dari beragam media massa.

Ada tiga kasus politik yang menarik perhatiannya. Pertama, adalah kasus Megawati. Ia mendengar bahwa Megawati, pimpinan resmi sebuah partai politik, PDI, oleh sebagian pendukungnya dicalonkan menjadi presiden. Ia juga mendengar komentar berbagai para pakar dan politisi atas pencalonan ini.

Kedua adalah kasus PBNU. Ia juga mendengar tentang konflik PEngurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia sedikit tahu. PBNU adalah organisasi masyarakat terbesar dengan dukungan massa di

berbagai daerah, sangat tua usianya dan telah menyumbang banyak dalam pertumbuhan bangsa Indonesia. Mr. X lalu membaca ternyata sekarang ada PBNU tandingan, lengkap dengan susunan pengurus dan kantor sekretariatnya. Terjadi saling klaim antara dua kubu. Dua organisasi itu kini punya nama yang sama.

Ketiga adalah kasus PDI Jawa Timur. Ia juga membaca ada pertentangan serta tarik menarik antara ketua resmi partai (PDI) dan gubernur Jawa Timur tentang siapa yang seharusnya memimpin PDI di wilayah itu. Ia mendengar kasus ini tidak kunjung tuntas sejak tahun lalu. Kemudian dibentuk panitia pemilu Jawa Timur, dan PDI tak memiliki wakil di kepanitiaan.

Mr. X akan banyak bertanya dan mengerutkan kening untuk sungguh-sungguh memahami apa yang terjadi. Sebagai aktivitas politik yang matang, tentu pertama kali yang ia lakukan adalah membaca UUD 45 dan Pancasila, yang ia dengar, menjadi dasar dari segala aturan main.

Tentang PBNU, Mr. X. mungkin akan terus mencari tahu mengapa bisa ada dua organisasi dengannya yang sama? Apakah hukum di Indonesia tidak memberikan aturan agar setiap organisasi politik harus memberi nama yang berbeda, tan-yanya? Ia lebih heran lagi setelah tahu bahwa ulama itu adalah ahli agama yang di-harapkan menjadi penjaga moral. Sambil mengencangkan dahi, ia bertanya bagaimana mungkin organisasi para ahli agama yang sangat besar, dihormati, dan sangat tua bisa menjadi dua dan berkonflik tetapi memakai nama yang persis sama?

Tentang kasus Jawa Timur, Mr. X boleh jadi akan bertambah bingung. Mung-kin ia akan bertanya, di Indonesia ini apakah pimpinan partai resmi seperti PDI ber-tanggung jawab kepada berbagai gubernur di setiap propinsi ? jika tidak, mengapa gubernur sangat berkuasa dalam menentukan kepengurusan partai politik?

Setelah diberi tahu bahwa gubernur di daerah itu adalah Pembina politik bagi semua organ-isasi di wilayahnya, Mr. X mungkin semakin bingung. Dan semakin banyak lagi kemungkinan pertanyaan yang timbul.

Semua kebingungan Mr. X dan jawaban atas segala pertanyaannya di atas adalah ba-gian dari apa yang dalam literatur ilmu politik disebut sebagai kultur politik. Yaitu seperangkat nilai, kepercayaan, dan sentiment yang mendasari tingkah laku para actor dalam sistem itu. Perangkat ini meliputi baik sistem ideal sebagaimana yang terekam dalam dokumen resmi seperti undang-undang, maupun praktek politik yang lahir ka-rena kebiasaan dan konvensi. Melalui proses waktu kultur politik itu tersosialisasikan dan tertanam dalam kesadaran publik.

Memang output politik tidak hanya ditentukan oleh kultur politik. berbagai variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi dan konstelasi kekuasaan politik punya peranan yang tak kalah besarnya. Bahkan dapat diklaim, berdasarkan perspektif ter-tentu, kultur politik hanyalah produk dari kombinasi pembangunan ekonomi dan relasi kekuasaan politik.

Terlepas dari setuju atau tidak atas klaim itu, ia tetap tidak dapat mengingkari bahwa kultur politik sangat berpengaruh dalam menentukan bulat lonjongnya output politik. Kultur politik penting, sebagian, karena ia menjadi basis legitimasi perilaku politik. Apakah sebuah tindakan politik dipandang baik atau buruk, layak atau tidak, didukung atau dilawan, sangat ditentukan oleh kultur politik dominan sebuah Negara.

Pada tingkat individu kultur politik mengarahkan pilihan subyektif dan kerangka pandang sang actor. Apa yang ingin ia capai, caranya menilai dan merespon, sangat tergantung dari jenis kultur

politik yang ia serap. Seorang demokrat, sebagai misal, berbeda dengan seorang otoritarian dalam merespon perbedaan pendapat.

Pada tingkat makro, kultur politik menjadi sekat pembatas atau pendorong ke-cenderung-an politik. Kultur yang demokratis, misalnya, menjadi pembatas bagi prak-tek politik yang mengingkari hak-hak asasi, dan pendorong bagi kompetisi politik yang terbuka. Kultur otoritarian sebaliknya, menjadi pembatas bagi terselenggaranya control social dan pendorong berlakunya prinsip the might is right, bahwa yang kuat yang benar.

Ada studi tentang kultur politik yang dimulai sejak tiga puluhan tahun lalu oleh Almond dan Verba (1963), dan terus dilanjutkan oleh Eckstein (1988), Inglehart (1988), sampai Fukuyama (1995). Almond dan Verba meneliti 5 negara yang sebagian demokratis dan sebagian lagi nondemokratis. Mereka menemukan adanya impulse kultur yang berbeda di berbagai negara yang diteliti. Di negara yang dikategorikan demokratis, mereka menemukan unsur kultur politik khusus yang kemudian mereka beri nama civic culture. Sedangkan di Negara nondemokratis civic culture itu tidak ditemukan atau sangat lemah.

Berangkat dari penelitian inilah kemudian disimpulkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan pembangunan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dihayatinya civic culture oleh umumnya warga Negara, terutama para elit yang berada dalam posisi mempengaruhi keadaan. Dengan kata lain, tanpa menyebar dan mengakarnya civic culture dalam ruang publik praktek politik yang terjadi akan menyebabkan dua hal: demokrasi yang tidak stabil atau sistem politik yang stabil tapi otoritarian.

Kini term civic culture ini digunakan sebagai label untuk merangkum berbagai nilaidan perilaku yang memperkuat institusi demokrasi. Elemen civic culture itu antara lain: penghormatan atas

kultur kompetisi dengan nama fair play; kemampuan bekerja sama dan sikap saling percaya (level of trust, interpersonal trust) dalam interaksi sosial ; sikap hidup yang toleran dan moderat; kompetensi teknis yang dibutuhkan warga Negara yang aktif seperti kemampuan menyeleksi informasi dan berpikir kritis; self determination dan kepercayaan kepada sistem hukum serta institusi kenegaraan.

Demokrasi misalnya, mustahil tercipta tanpa diterimanya kompetisi sebagai proses politik yang wajar. Kompetisi politik adalah solusi yang paling memadai untuk menyalurkan impulse dasar manusia untuk berkuasa. Kompetisi menjadi jalan yang adil dan terbuka bagi semua pihak, bahkan untuk jabatan politik tertinggi sebuah Negara. Pengakuan atas kompetisi itu tidak hanya tercatat dalam buku teks dan kitab undang-undang, tetapi juga harus menjadi praktek politik.

Mustahil pula kompetisi politik dapat menjadi sehat dan berguna tanpa dihayatinya asas fair play, yaitu sikap sportif untuk menundukkan diri kepada prosedur dan aturan main yang adil, terbuka, serta jujur, lalu menerima kemenangan di pihak manapun. Jika setiap kompetisi politik di organisasi besar diikuti oleh terbentuknya organisasi tandingan, sistem politik secara keseluruhan dapat lumpuh.

Mustahil pula tercipta demokrasi tanpa adanya penghargaan atas prinsip self-determination, yang membiarkan organisasi masyarakat mengurus dirinya sejauh ia tidak melanggar undang-undang criminal dan kegiatan spionase. Tanpa self-determination dan independensi, setiap organisasi tidak dapat membuat keputusan berdasarkan pilihannya sendiri yang dianggap paling menguntungkan. Intervensi dari pihak luar, apalagi dari lawan kompetisi, mudah menjadi bias untuk kepentingan pihak yang mengintervensinya sendiri.

Uraian di atas dapat memberikan gambaran mengapa civic culture sangat penting bagi proses politik yang sehat, adil, dan terbuka. Tiga

persoalan yang dihadapi Mr. X di awal tulisan ini menunjukkan masih rendahnya civic culture dalam kasus politik yang penting di Tanah Air, seperti penerimaan yang negatif atas hak warga dan pimpinan partai untuk berkompetisi politik (kasus pencalonan Megawati); rendahnya penghayatan atas prinsip fair play dalam kompetisi (kasus PBNU); dan tidak dihormatinya prinsip self-determination (kasus PDI di Jawa Timur).

Cepat atau lambat kultur politik baru harus diperkenalkan untuk mengimbangi liberalisasi yang semakin dalam di dunia ekonomi. Jika tidak, akan terjadi benturan structural dan sistemik antara praktek ekonomi dan praktek politik di Tanah Air. Karena itu setiap langkah inovasi yang dapat menumbuhkan civic culture, sekecil apapun, harus dibaca sebagai berita gembira.*

Mencari Visi ICMI

Mungkinkah ICMI berkembang seperti The Heritage Foundation? Pertanyaan ini muncul setelah merenungkan kemungkinan peran yang akan dimainkan ICMI di masa datang. Lima tahun pertama sudah dilalui. Pengurus baru 1995-2000 sudah terbentuk. Peraturan yang ada saat itu tidak memungkinkan lembaga ini berkembang menjadi partai politik. Menjadi LSM, yang terlibat secara praktis dalam pengembangan masyarakat, juga bukan pilihan, seperti yang dinyatakan Adi Sasono.

Peran ICMI, kata Adi Sasono, berada pada level pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang bersifat makro. Kegiatan yang dilakukannya bersifat kajian dan keilmuan, seperti seminar profesi yang bertujuan untuk melakukan reformasi dalam skala nasional.

Jika harapan Adi Sasono ini menjadi kenyataan, model yang patut dipelajari adalah The Heritage Foundation . lembaga ini, bermarkas di Washington D.C., didiri-kan pada tahun 1973 dan telah banyak

melahirkan studi kebijaksanaan. Sebagai dapur pemikiran (think tank), ia sangat berpengaruh dalam kehidupan publik di Amerika Serikat.

Besarnya pengaruh The Heritage Foundation dapat dilihat dari beberapa ukuran. Ia memiliki dan membina jaringan dengan 2.000 akademisi terkemuka dan ratusan policy research group; sudah menerbitkan sekitar 1.000 dokumen, mulai dari yang berhalaman di atas 1.000 sampai yang hanya belasan halaman; mempublikasikan berbagai penerbitan, mulai dari yang mingguan (Backgrounder), bulanan dan jurnal akademis quarterly (Policy Review) serta Monograph. Aksesnya langsung ke pengambil kebijaksanaan tertinggi, mulai dari presiden, anggota Kongres, sampai pemimpin partai.

Kerja lembaga ini sangat serius. Pada 1988, misalnya, ia menyiapkan tiga volume agenda masa depan dalam era pasca Reagan. Sebanyak 238 agenda ia siapkan dalam program operasional dan dapat dicapai. Agenda itu meliputi masalah tenaga kerja (Plank 28: Mempromosikan Kesempatan Kerja dengan Mereformasi Upah Minimum), masalah transfer teknologi (Plank 120: Membatasi Transfer Teknologi Barat ke Blok Soviet), sampai masalah bantuan dunia ketiga (Plank 173: Mempromosikan pertumbuhan Sektor Swasta Dunia Ketiga sebagai syarat bantuan dana).

Namun yang membuat lembaga ini begitu bergema adalah visi yang ditawarkan. Berbagai kebijaksanaan yang ditangani – yang sangat beragam itu – tetap terkait dalam sebuah platform yang jelas : konservatisme. Sejak berdiri lembaga ini sudah mencanangkan berjuang untuk mempopulerkan prinsip pasar bebas, pemerintahan yang terbatas, kebebasan individu, dan pertahanan nasional yang kuat. Apa pun jenis kebijaksanaan yang ia tangani adalah operasionalisasi dari konservatisme. Ia tetap konsisten sejak ideology tersebut tidak populer (pada 1970-an) sampai menjadi dominan dan mainstream (pada 1980-an dan 1990-an).

ICMI potensial tumbuh dan berkembang seperti The Heritage Foundation. ICMI juga memiliki dan dapat terus meningkatkan berbagai tenaga ahli, akses ke pengambil kebijaksanaan dan sarana publikasi. Namun satu hal penting yang belum dimiliki ICMI adalah visi. Dapat dikatakan ICMI belum secara serius dan menyeluruh merumuskan visi organisasinya.

Masih belum jelas visi ICMI mengenai ekonomi, politik, kebudayaan, dan hubungan internasional. Dalam bidang ekonomi, misalnya, apakah ICMI pro-market sebagaimana layaknya para ekonom neoklasik? Ataukah ICMI lebih pro kepada peran pemerintah yang besar, baik untuk re-distribusi kesejahteraan maupun proteksi industry dalam negeri? Ataukah ICMI memiliki konsep ekonomi sendiri yang berdasarkan ajaran Islam? Memang sudah dikatakan bahwa agenda ICMI yang utama adalah menghapuskan kesenjangan. Tetapi bagaimana visi penghapusan kesenjangan itu, karena setiap visi akan memiliki persepsi dan rekomendasi yang berbeda?

Di bidang politik, apakah ICMI pro-demokrasi ala Barat? Ataukah ia menganggap sistem politik yang berlaku sekarang adalah bentuk yang final? Ataukah ICMI memiliki gagasan demokrasi yang lain sama sekali? Lalu bagaimana memformulasikan pilihan visi itu ke tahap operasional untuk merespon situasi yang actual? Bagaimana pula mengaitkan ajaran agama Islam dalam bidang politik? Dengan atau tanpa menyinggung ajaran formal Islam, apakah warna sebuah policy akan berbeda?

Setiap pemimpin di ICMI boleh jadi sudah mempunyai sikap atas pertanyaan di atas. Namun, sebagai sebuah organisasi, kita belum mendengar adanya platform yang operasional, yang disepakati bersama, dan diumumkan secara public.

Tanpa kejelasan visi organisasi, berbagai rekomendasi dan studi kebijaksanaan dari ICMI hanya akan bersifat ad hoc dan sangat

tergantung pada pribadi yang sedang bertugas di bidang itu. Akibatnya dalam jangka panjang, boleh jadi satu rek-omendasi akan bertentangan dengan rekomendasi yang lain. Atau perubahan personalia dalam organisasi akan mengakibatkan perubahan warna policy-nya pula. Lebih mendasar dari itu, ICMI hanya akan besar dalam ukuran fisik keorganisasian tetapi tidak dalam kejelasan dan relevansi visinya.*

Agama dan Politik

Mengapa kini banyak kelompok agama di Amerika Serikat mentransforma-sikan diri sebagai kekuatan politik? Mereka membentuk barisan ; mengorganisasikan diri; mempengaruhi opini public; lalu ingin menjadi kekuatan penekan yang efektif bagi pengambil kebijaksanaan.

Louis Farrakhan, pemimpin Nation of Islam itu, hanya salah satu contoh.ia memimpin gerakan One Million March, 16 Oktober 1995. Ia menobatkan hari itu se-bagai the day of atonement, hari penebusan dosa dan awal kebangkitan spiritual kulit hitam. Ratusan ribu kulit hitam dari berbagai Negara bagian berbondong-bondong datang ke Washington, D.C., mendengarkan seruannya. Inilah jumlah massa terbesar di bidang gerakan civil rights dan minoritas dalam sejarah Amerika Serikat.

Berhari-hari media massa di Amerika Serikat membahasanya. Bahkan dua televisi, CNN dan C-SPAN, menyiarkan acara itu secara

langsung sekitar 12 jam. Popularitas Farrakhan pun melambung. Pol pendapat yang diselenggarakan CNN setelah acara itu selesai menobatkannya sebagai tokoh paling berpengaruh di kalangan kulit hitam, di atas Jesse Jackson dan Collin Powell.

Namun Louis Farrakhan rupanya tidak ingin menjadi juru dakwah agama belaka. Ia ingin mentransformasikan dukungan yang didapatnya lebih jauh. Hari berikutnya, ia membuat pernyataan pers. Bukan partai politik ketiga yang ingin didirikannya, melainkan sebuah kekuatan politik baru. Ia menerima nama kekuatan baru itu :Exodus.

Pemilihan nama Exodus sendiri sudah mengundang imaji. Para pengikutnya akan langsung mengasosiasikan Farrakhan sebagai "Nabi Musa" bagi kulit hitam. Pemujanya yang fanatic makin melihatnya tidak hanya sebagai pemimpin agama biasa, melainkan punya nuansa "kenabian" untuk membebaskan sebuah kaum dari kesengsaraan. Sebaliknya, pengkritiknya makin khawatir. Permainan simbol keagamaan ini akan membuat Farrakhan makin berilusi untuk melahirkan kekuatan nasionalis dan separatis kulit hitam yang memisahkan diri dari kulit putih, sebagaimana Nabi Musa memisahkan diri dari kaum Yahudi dari Mesir.

Di luar Louis Farrakhan dengan Nation of Islam-nya, Christian Coalition sudah lama berdiri. Kelompok ini bahkan sudah berkibar dengan kuat menjadi grassroot yang aktif di Partai Republik, partai mayoritas Amerika Serikat sekarang. Kuatnya Christian Coalition dapat dilihat dari pengaruhnya atas calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik tahun 1995. Isu-isu konservatif seperti family value dan anti aborsi, mendominasi calon.

Tentang menjamurnya kelompok agama di dunia politik Amerika Serikat, Daniel J.B. Hofrenning dapat bercerita banyak. Ia membuat riset. Bahkan di Negara Bagian Minnesota saja, satu dari 51 negara

bagian Amerika Serikat, ada sejumlah 31 kelompok. latar belakang agama kelompok ini cukup beragam: mulai dari evangelical, mainline protestant, sampai Roman Catholic. Isu politik yang dipropagandakan atau yang dilawan sangat beragam. Mulai dari antiborsi, anti hak-hak kaum gay, mendukung doa di sekolah public, antipornografi dan kekerasan di TV charity untuk kaum miskin, sampai pertolongan kepada para pengungsi dari Negara tertentu.

Ternyata 67% dari organisasi itu lahir setelah 1980-an. Mengapa kelompok agama dalam gerakan politik itu justru menjamur setelah 1980-an ? ada apa di tahun 1980-an di Amerika Serikat? Hoefrenning tidak menjelaskan.

Tahun 1980-an adalah era awal bangkitnya neo-konservatisme di Amerika Serikat. Ketika itu Ronald Reagan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Se-bagaimana Presiden Roosevelt yang membawa perubahan mendasar di Amerika Serikat pada 1930-an dengan welafer state-nya, Presiden Reagan membalikkan tradisi itu ke arah neo-konservatisme di tahun 1980-an. Roosevelt memimpin Amerika Serikat bergerak ke Kiri. Ronald Reagan membalikkan Amerika Serikat ke Kanan.

Di belakang Reagan dan di belakang neo-konservatisme berdiri para ekonom, filsuf dan penulis. Di bidang ekonomi ada Milton Friedman dan A. Hayek. Di bidang filsafat ada Irving Kristol. Ada pula penulis seperti William F. Buckley, Goldwater, dan George Will. Beberapa jurnal yang menjadi juru bicara dan penyebar gagasan mereka adalah National Review, Public Interest, dan Commentary. Setiap hari kerja di ABC ada pula talkshow Rush Limbaugh. Belum terhitung berbagai newsletter dan kolom media massa.

Di bidang keudayaan dan agama, filsuf yang acap ditunjuk adalah Edmond Burke dan Leo Strauss. Burke menegaskan pentingnya moral order yang ber-landaskan pada keluarga dan agama. Sebuah

masyarakat menjadi stabil jika ada instansi kukuh yang menjaganya. Institusi itu haruslah perwujudan dari nilai-nilai yang sudah lama tertanam dalam sejarah, seperti keluarga dan agama. Sedangkan Leo Strauss menggarisbawahi signifikansi sistem moralitas yang lahir pra-era kapitalisme, seperti agama dan tradisi, untuk mengintergrasikan perubahan cepat yang dibawa industrialisasi.

Tingginya angka kriminalitas di Amerika Serikat; penuh sesaknya penjara; intensitas kekerasan domestic di keluarga; penggunaan obat terlarang; banyaknya anak-anak yang tumbuh dengan orangtua tunggal; perkosaan, pembunuhan, dan tumbuhnya mentalitas ketergantungan kelas bawah atas subsidi pemerintah; sakit psikologis; membuat pandangan cultural neo-konservatisme makin relevan dan menggaung. Agama dibangkitkan dan dimasukkan kembali ke politik.*

Primordialisme Amerika

Di sekitar Gedung Putih, Washington, D.C, 4 Oktober 1997, ratusan ribu orang berkumpul memenuhi jalan, menghadap ke sebuah panggung raksasa. Menurut CNN, ini salah satu kerumunan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Sebagian dari mereka kadang bersujud, menangis, mengucapkan sumpah, bersorak, bertepuk tangan.

Kerumunan juga bukan sedang menghadiri konser music rock atau menyam-but kedatangan pahlawan dan pasukan yang baru saja memenangkan perang. Mereka sedang mengikuti sebuah prosesi keagamaan. Mereka penganut Promise Keepers, sebuah sekte agama Kristen. Mereka datang secara berkelompok dari berbagai Negara bagian dengan mencarter bus, kereta api atau pesawat terbang, agar bisa menjadi bagian peristiwa religious yang kolosal itu. Setahun sebelumnya sekte ini mengelilingin 20 negara bagian di Amerika Serikat. Mereka membuat ritual agama di stadion sepakbola yang

berkapasitas 50.000 sampai 70.000 orang, di masing-masing Negara bagian. Stadion itu selalu penuh sesak.

Di depan acara televisi C-SPAN yang menyiarkan secara langsung acara di Washington itu selama enam jam, saya termenung lama. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Mengapa Amerika Serikat, pusat peradaban sekuler, kini justru digoncang oleh kebangkitan berbagai kelompok agama?

Amerika Serikat saat ini, ujar Chip Berlet dan Qugley (1977) sedang dilanda perang kebudayaan. Kini tengah bangkit dengan perkasa gerakan politik sayap kanan yang menggunakan ajaran agama sebagai panduan politik. Tokoh utama gerakan ini adalah Pat Robertson, pendiri Christian Coalition, yang ingin mengubah Amerika Serikat menjadi sejenis "negara teokrasi otoritarian" .

Robertson mengikrarkan perang terhadap sistem Amerika Serikat yang makin bobrok karena berlandaskan kebudayaan sekuler. Sebagai alternatif, Robertson menawarkan sistem yang berlandaskan agama yang diyakininya. "Tidak akan pernah ada rasa damai" , ujar Pat Robertson, "sampai rumah Tuhan dan pengikut Tuhan diberikan haknya untuk memimpin dunia. Bagaimana ada rasa damai jika pema-buk, penganjur minuman keras, komunis, atheis, pemuja setan dan sekuler humanis, dictator, spekulan uang, pembunuh revolusioner, dan homoseks berada dalam top kepemimpinan?"

Peace Keepers, yang hari itu berdemo di Washington dan didirikan oleh Bill McCartney tujuh tahun silam, memang terkesan jauh lebih moderat ketimbang kelompok Pat Robertson. Namun pengamat politik melihatnya hanya sebagai strategi. Ada agenda politik yang disembunyikan, yang baru akan dimunculkan setelah gelombang gerakan menjadi besar.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa di Amerika Serikat telah terjadi pergeseran area konflik, dari persoalan ekonomi dan politik ke

persoalan kultur dan gaya hidup. Tidak ada lagi perdebatan ideologis yang menyangkut sistem ekonomi dan politik. Kapitalisme sebagai model ekonomi dan demokrasi sudah mengakar dan diterima secara luas. Kalaupun ada perselisihan di bidang ekonomi atau politik sifatnya tak mendasar. Paling-paling hanya menyangkut masalah graduasi, seperti seberapa besar pajak ditingkatkan atau diturunkan, dan seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam ekonomi.

Namun dalam masalah kultur dan gaya hidup, konflik makin menganga, me-nyentuh ke masalah ideologis dan emosional. Isu kultur dan gaya hidup memecah belah masyarakat ke dalam pro dan kontra serta pemihakan. Misalnya pro dan kontra atas aborsi, homoseksual, atau orangtua tunggal. Mereka yang kini aktif di berbagai kelompok agama, yang mengambil posisi seperti Pat Robertson, bersebarangan dengan mereka yang tumbuh dalam kultur yang sekuler dan humanis.

Kelompok Pat Robertson dan Promise Culture mendapat momentum dari per-soalan besar yang kini tengah dihadapi Amerika Serikat, seperti tingginya angka per-ceraian, maraknya tindak kriminalitas di kota besar, atau meluasnya gerakan homoseksual, yang semuanya dianggap mengancam kenyamanan hidup dan nilai-nilai konservatif.

Masalah di atas tidak lagi dapat diatasi dengan hanya mengubah institusi atau sruktur social. Dibutuhkan respons yang berhubungan dengan filsafat hidup dan sis-tem makna perorangan. Dan agama yang sudah mentradisi adalah obat mujarab.

Persoalannya Pat Robertson dan tokoh sejenisnya telah mempolitisasi agama sedemikian rupa, sehingga agama menjadi eksklusif. Berbagai gerakan politik agama yang di Amerika Serikat dicap sebagai politik Kanan ekstrem itu memiliki ciri menomorduakan kelompok masyarakat tertentu. Ada yang mengunggulkan kulit putih

dan mendiskriminasi kulit berwarna. Ada yang memuja patriotisme Amerika Serikat dan antitimidiran. Promise Keepers misalnya, hanya mencari pengikut lelaki yang memomorduakan wanita. Ada pula yang membuat diskriminasi berdasarkan agama.

Tak mengherankan jika berbagai kelompok yang ingin memelihara keberagaman dan persamaan hukum bagi semua warga negara menganggap gerakan politik agama Pat Robertson dan Promise Keepers sebagai ancaman. Di dalam masyarakat sendiri tumbuh banyak organisasi yang siap melawan gerakan sejenis Pat Robertson. Mereka antara lain American United for Separation Church and State, Institute for First Amendment Studies, The Interfaith Alliance, dan Equal Partners in Faith. Kelompok lintas agama, ras dan gender ini cukup efektif membentuk opini publik.

Ada baiknya jika tokoh masyarakat di Indonesia membentuk sejenis kelompok kerukunan antar agama, ras dan pun etnik, seperti The Interfaith Alliance, atau Equal Partners in Faith. Jika kelompok kerukunan ini mampu mengakar di massa, konflik primordial dinegeri kita bisa dikurangi.*

BAB III

Isu Manuver Politik

Tokoh 1995

Punyakah kita tokoh seperti Newt Gingrich di Tanah Air? Ia dinobatkan Majalah Time sebagai “Man of The Year” 1995. Lebih dari pemimpin lainnya, demikian tulis Majalah Time, ia mengubah kosa kata dan spirit politik Amerika. Pu-nyakah kita tokoh yang berpotensi mengubah kosa kata dan spirit politik Indonesia?

Melalui bukunya, *To Renew Amerika* (1995), ia berbicara kepada publik luas. Peradaban Amerika, ujar Gingrich dalam buku itu, kini tengah mengalami krisis. Di satu sisi Amerika adalah satu-satunya superpower dunia yang menyatukan kekuatan ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan sekaligus dalam tangannya. Penduduknya sangat beragam dengan aneka kultur, agama, status ekonomi, atau pun motivasi. Na-mun negeri itu mampu memberikan kesejahteraan, kebahagiaan sebesar-besarnya. Di sisi lain, nilai-nilai tertinggi peradaban ini justru mulai ditinggalkan oleh banyak warga Amerika sendiri. Akibatnya, kultur kekerasan tumbuh subur, terutama di kota besar.

Nilai-nilai keluarga yang konservatif memudar. Negeri ini, Gingrich berseru, telah memimpin koalisi untuk menghancurkan fasisme Jepang, Jerman, dan Italia. Setelah fasisme jatuh, negeri ini juga memimpin separuh penduduk dunia lainnya untuk mengalahkan komunisme. Adalah ironis, ketika ia mampu memenangkan peperangan di tingkat dunia, di dalam negeri sendiri Amerika dikalahkan oleh jenis perang yang lain. Bagaimana peradaban Amerika dapat survive dengan warganya yang baru berumur 12 tahun sudah menggendong bayi, baru berumur 15 tahun sudah saling membunuh. Yang berusia 17 tahun tengah sekarat menghadapi penyakit AIDS dan yang berumur 18 tahun mendapat diploma tetapi tidak dapat membaca diplamanya sendiri.

Amerika Serikat, ujar Gingrich lebih lanjut, telah membawa manusia mendarat di bulan, memimpin dunia dalam molecular medicine, dan membukakan gerbang bagi sejarah untuk menuju abad computer dan revolusi komunikasi. Namun pada saat yang sama, berbagai institusi pendidikan Amerika mengalami krisis. Lihatlah kondisi anak-anak Amerika yang makin rendah kemampuannya dalam matematika dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan anak-anak dari Negara industry lain. Amerika tengah terancam makin tidak memahami kompleksitas dunia yang telah kita temukan sendiri.

Dengan latar belakang keprihatinan itu, Gingrich pun berseru sebagaimana layaknya pemimpin revolusioner yang menginginkan perubahan cepat dan mendasar. Peradaban Amerika, ujarnya perlu diperbaharui. Mutiara yang telah membawa ameri-ka ke puncak kejayaannya perlu dimunculkan kembali. Segala unsur yang menyebabkan kejatuhan peradaban ini harus segera dimusnahkan. Lalu ia mengutip buku *A Study of History* dari Toynbee, dan bercerita tentang beberapa peradaban besar yang kemudian hancur dan hilang. "Peradaban besar Amerika dapat mengalami kejatuhan yang sama," ujarnya. Seruan Gingrich pun bergema ke public luas.

Gingrich tidak hanya bicara dan merumuskan keadaan. Ia pun seorang poli-tikus yang ulung. Ia memformulasikan visi politiknya itu ke dalam berbagai agenda yang operasional. Sebagai pemimpin Kongres (Speaker of the House) ia berjuang keras memaksakan berbagai visi politiknya, memimpin anggota parlemen lain untuk berkomitmen menggolkan agenda yang diberi nama Contract with America.

Memang tidak semua harapan Gingrich menjadi kenyataan. Ia harus menghadapi Presiden Clinton yang datang dari partai politik dan punya agenda ber-beda. Berbagai lawan politik terus menerus mencari dan mengeksploitasi kelema-hannya. Di akhir tahun, popularitasnya bahkan menurun. Namun, sebagaimana Ronald Reagan, ia sudah mengubah polical mood politisi dan masyarakat Amerika untuk semakin konservatif, yang percaya kepada pemerintahan yang minimal, kebebasan individu, prinsip pasar bebas, nilai-nilai keluarga dan agama.

Yang istimewa pada Gingrich, ia menampilkan kembali sosok politikus tradi-sional, figuur pemimpin sekaligus pemikir. Dalam dirinya bertemu dua dunia, dunia praktis dan dunia konsep. Ia memiliki ketajaman, koherensi, dan visi seorang pemikir, intelektual, atau akademikus. Ia juga memiliki semangat dan passion seorang politikus, activist atau pejuang, sebagaimana politisi besar di Amerika Serikat, seperti Thomas Jefferson dan James Madison. Dua tokoh ini adalah Presiden Amerika Serikat di zamannya dan juga pemikir, peletak dasar filsafat dan politik, yang menjadi sokoguru sistem politik Amerika Serikat sekarang.

Di tanah Air, kita pun pernah punya politisi dari jenis pejuang pemikir. Mereka adalah generasi 1928 yang menjadi founding fathers Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan Moh. Natsir. Kepiawaian mereka sebagai politisi tidak diragukan. Namun lebih dari umumnya politisi, mereka pun adalah pemikir

yang menyerap ide-ide politik terbaik di zamannya dan memberikan visi bagi pengikutnya. Soekarno dengan visi nasionalisme; Hatta dan Sjahrir dengan social-demokrasi; Tan Malaka dengan populisme dan Moh. Natsir dengan Islam.

Namun makin lama, kita makin kehilangan tipe pemimpin yang visioner, politisi dengan kecemerlangan intelektual. Politik makin kurang bersifat ideologis serta makin bersifat administrative, teknis, dan manajemen dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Politisi pun makin tampil seragam, sebagai professional eksekutif atau manajer yang kurang terlibat dalam discourse gegap gempita ideology dan keberagaman citta-cita nasional. dunia politik menjadi makin kering. Newt Gin-grich agaknya mengingatkan kita bahwa politik juga adalah sebuah gelora, sebuah passion, sebuah medan pertarungan berbagai visi.*

Kolumnis Politik

Seberapa besar sebenarnya pengaruh seorang penulis kolom politik? Saat itu public di Amerika Serikat tengah mempercakapkan William Safire, penulis kolom politik yang dianggap terbaik dan paling berpengaruh. Ia menulis kolom rutin di New York Times, koran yang paling banyak dibaca oleh pengambil kebijakan, di samping Washington Post. Namun hari itu, 8 Januari 1996, Safire secara khusus menyerang Ibu Negara Hillary Clinton. kolom yang ia tulis berjudul tajam dan keras: Badai Ke-bohongan (Blizzard of Lies).

Masyarakat Amerika dari berbagai golongan, ujar Safire, sangatlah tidak beruntung. Ibu Negara Hillary Clinton, wanita yang berbagai bakatnya tidak diragukan dan menjadi idola banyak orang di generainya, ternyata seorang pembohong (a congenital liar). Perlahan-lahan, dengan makin terungkapnya kasus Whitewater, ujar Safire, kita menjadi tahu Ibu Negara telah memberikan keterangan palsu. Ia memper-daya kawan-kawannya sendiri dan

staf yang membelanya dengan aneka jerat ke-bohongan. Safire lalu memberikan bukti, argument, dan data satu per satu.

Secara cepat dan serentak kolom politik Safire menjadi pergunjangan public. Berbagai media massa dan tokoh politik membahasnya. Siaran televisi CNN mengulas kolom politik itu di berbagai program utama, mulai dari "Larry King Live" , "Cross Fire" , "Inside Politics" "Caliabile Sources" . Program "Inside Politics" bahkan menganggap kolom politik Safire sebagai berita terpenting pekan itu. Sekretaris kepresidenan, bahkan Presiden Clinton dan Hillary sendiri, merasa perlu merespon.

Jajak pendapat yang kemudian dilakukan oleh Time-CNN menunjukkan mer-osotnya popularitas Hillary. Lebih dari 50% publik Amerika Serikat merasa bahwa Hillary memang telah berbohong dalam kasus Whitewater, yang menuduh Hillary dan Clinton melakukan penggelapan uang sekitar 15 tahun lalu ketika Clinton masih menjadi gubernur di Arkansas.

Bukan isi kasus Whitewater ini yang benar-benar menarik, melainkan konteks politik yang melingkupinya. Tahun ini adalah tahun pemilihan presiden Amerika Serikat. Kolom politik Saffire dianggap telah membalikkan citra Ibu Negara Hillary, yang dapat berpengaruh pada popularitas Presiden Clinton sendiri. Setelah kolom Sa-fire, Newsweek, yang pernah menokohkan Hillary dengan judul sampul : Politics of Virtue, kini menampilkan Hillary dengan judul sampul terbalik : Saint of Sinner. Bahkan majalah The weekly Standard disampulnya melukiskan wajah Hillary yang menyerupai Richard Nixon. Presiden Nixon jatuh karena Watergate. Kini Hillary (dan Clinton) dengan kasus Whitewater.

Ibu Negara Hillary bukanlah korban pertama kolom politik William Safire. Kerja yang lebih gemilang dilakukan Safire di tahun 1977. Korban pertamanya di ta-hun itu adalah Bert Lance, direktur budget

dalam era Presiden Carter. Melalui investigative report I dan kolom politiknya yang rutin. Safire mengungkapkan skandal keuangan yang dilakukan Bert Lance. Akibatnya Lance mengundurkan diri dan William Safire memperoleh Pulitzer Prize, penghargaan tertinggi di bidang jurnalistik.

Setelah Lance, berbagai tokoh penting yang menjadi sasaran tembaknya, termasuk William Casey dalam skandal Iran, James Baker dalam kasus Perang Teluk, dan bahkan pemimpinya sendiri di kubu konservatif, Ronald Reagan. Safire pun ditakuti bukan saja karena akurasi data yang ia punya dan gaya penulisannya yang menyerang, melainkan juga indah. Ia lebih ditakuti karena informasi di tangannya banyak yang sangat eksklusif, yang hanya diketahui oleh sangat sedikit insiders.

Punyakah kita penulis kolom politik seperti Safire di Tanah Air? Setidaknya ada tiga hal yang membuat penulis kolom politik di Indonesia sangat susah menyamai William Safire. Pertama, penulisan kolom di Amerika Serikat sudah menjadi profesi. Menjadi kolumnis di Amerika bukan pekerjaan sampingan seperti di Indonesia. Ia sudah menjadi status yang terhormat dengan bayaran yang sangat tinggi. Safire, misalnya, memberi ceramah 12-15 kali, dengan bayaran sekitar Rp 45 juta sekali ceramah. Total penghasilannya setahun diperkirakan sekitar Rp 1,2 milyar, hanya dari ceramah, menulis kolom, dan buku. Dengan penghasilan besar, ia dapat berkonsentrasi dan intens di bidang penulisan kolom.

Kedua, kedekatan dan hubungan khususnya dengan para pengambil kebijakan. Untuk membuat sebuah tulisan penting ia kadang menelepon beberapa sumbernya di dalam pemerintahan. Melalui mekanisme ini ia memperoleh informasi segar dari tangan pertama sebelum informasi itu meluas ke public. Ia juga memiliki akses ke berbagai dokumen penting yang susah ditembus orang

lain. Safire sendiri adalah mantan penulis pidato presiden era Nixon. Ia memang sudah mengenal lika-liku informasi Gedung Putih.

Ketiga, kultur kebebasan di Amerika Serikat sendiri. Investigasi atas masalah publik dan publikasi atas investigasi itu adalah sesuatu yang halal secara politik. Ia adalah bagian dari hak warga negara yang justru berfungsi positif bagi koreksi dan control atas praktek pemerintahan ataupun tingkah laku individual para politisi. Serangan atas ibu Negara, seperti atas Hillary Clinton yang disertai data akurat adalah hal yang jamak belaka.

Namun Safire bukanlah contoh terbaik dari penulis politik bagi Negara yang tengah tumbuh seperti di Indonesia. Walau dengan tingkat keahlian yang tinggi, Sa-fire lebih banyak mengeksplorasi politik sehari-hari (*day to days politics*). Sedangkan negeri kita lebih butuh tipe penulis politik yang menawarkan visi dan memberikan prospektif perubahan.

Voltaire jelas lebih ideal. Berbagai tulisannya yang dibukukan dalam *Letters on the English* memulai revolusi Perancis dan abad pencerahan di Eropa. Opini nya dibangun oleh analisis yang tajam atas kekuasaan yang ada, dalam oleh renungan filosofis, bahasanya puitis dan visioner. Akankah punyakah kita penulis politik seperti Voltaire untuk memulai pencerahan di Indonesia ?*

Jiang Zemin dan Amerika Serikat

Akhir Oktober 1997, Jiang Zemin, presiden Negara komunis terbesar, Republik Rakyat Cina (RRC), melawat selama Sembilan hari ke Amerika Serikat, pusat negara kapitalis Barat. Dia, antara lain, mengunjungi Honolulu, Washinton D.C., New York City, dan Boston. Zemin berbicara dan bertatap muka dengan banyak kalangan di sana: mulai pengusaha, politikus, aktivis, demonstran, hingga artis. Ia berbicara di berbagai forum : mulai acara resmi di Gedung Putih sampai ke altar Universitas Harvard, pusat akademisi yang sangat bergengsi.

Jiang Zemin boleh jadi tertegun. Ia menerima respon yang tidak hanya ber-beda-beda, melainkan juga bertentangan. Di Harvard misalnya, dia disambut ribuan demonstran. Demonstrasi tersebut adalah yang terbesar di kampus itu sejak aksi protes Perang Vietnam pada tahun 1960-an dan 1970-an. Berbagai isu serta poster yang mencaci maki dilontarkan kepada Zemin: mulai masalah Tibet, pembebasan tokoh oposisi Wei Jingsheng dan Wang Dan, kerja

rodi di penjara, pemalsuan soft-ware computer, sampai masalah kebebasan beragama di RRC.

Tokoh dibalik demonstrasi itu adalah Richard Gephard, Ketua Partai Demo-krasi di Kongres Amerika Serikat. Gephard juga disebut-sebut sebagai salah seorang calon presiden terkuat Amerika Serikat di masa depan. Menurut Gephard, pelang-garan hak asasi yang dilakukan pemerintah RRC harus dibalas masyarakat internasional. Menurutnya Amerika Serikat dapat memimpin aliansi untuk menjatuhkan sanksi ekonomi ataupun pembatasan impor barang-barang dari RRC di pasar Amerika Serikat.

Namun di kalangan pengusaha, terutama di California, Zemin mendapat sam-butan yang sama sekali berbeda; hangat dan memuji. Dalam komunitas ini, Zemin tidak mendengar isu hak asasi. Pembicaraan bergulir mengenai aneka masalah bisnis serta kerjasama industry RRC dan Amerika Serikat pada masa kini dan akan datang. "Kami menganggap Cina sebagai sumber bisnis yang sangat penting untuk waktu yang lama ", ujar Hughes, wakil presiden perusahaan teknologi Steve Dorman.

Komunitas bisnis yang hangat terhadap RRC dan tidak menyinggung masalah hak asasi juga didukung para politikus yang tangguh. Diantaranya, adalah mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger. Menurut komunitas ini, kepentingan bisnis harus menjadi criteria utama untuk merumuskan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat. Disamping itu, tidak ada faedahnya mengaitkan isu hak asasi dengan sanksi ekonomi ataupun pembatasan perdagangan.

Di zaman yang semakin global seperti sekarang, yang tersedia banyak substi-tusi bagi setiap produk dan tersedia pula aneka barang gelap, sanksi ekonomi diang-gap tidak efektif. Lebih dari itu, jika dunia bisnis RRC makin berkembang, hak asasi manusia

justru akan makin dianggap penting pula sebab bisnis yang maju melahirkan kelas menengah dan kalangan terdidik yang makin mandiri secara ekonomi, peduli terhadap hak asasi, dan ingin ikut mengatur kebijaksanaan yang sebaiknya ditempuh rezim yang memerintah. Sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan justru kon-traproduktif terhadap penerapan hak asasi manusia.

Mengapa terjadi perbedaan sikap yang mencolok di kalangan aktivis, poli-tikus, dan pengusaha Amerika Serikat terhadap Negara sepenting RRC, yang di-perrkirakan menjadi salah satu superpower pada abad ke-21 dan menjadi saingan ter-berat Amerika Serikat? Menurut Huntington (1997), sejak runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat kehilangan orientasi. Musuh lama Amerika Serikat yakni Uni soviet sudag hilang. Namun musuh baru belum terumus-kan. selama 40 tahun, Perang Dinginlah yang menjadi landasan seluruh kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, sekaligus menjadi panduan dan criteria pengambilan kebijaksanaan.

Berbagai program besar dirancang untukmenghadapi Perang Dingin seperti Marshall Plan, NATOo (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), pengembangan senjata nuklir, bantuan luar negeri, operasi intelejen, perdagangan bebas, program luar angkasa, aliansi dengan blok Barat dan dunia ketiga, pelatihan militer bagi Negara lain, penyediaan pos militer di kawasan strategis, Perang Vietnam, pendekatan Cina dan dukungan bagi Afghanistan.

Setelah Perang Dingin usai, AmerikaSerikat kehilangan musuh besarnya. kepentingan nasional akhirnya dirumuskan secara temporer, berdasarkan ancaman dan kebutuhan sesaat yang mudah berubah-ubah. Karena tidak ada lagi kerangka besar ideologis yang komprehensif, sebagian tokoh berpengaruh mereduksi kepentingan nasional hanya menjadi kepentingan bisnis.

Pemerintahan Clinton, misalnya, ujar Huntington, kini memberikan prioritas bagi diplomasi komersial, yang menjadikan promosi ekspor perdagangan Amerika Serikat sebagai tujuan utama. Prestasi di dunia bisnis kini menjadi kriteria utama keberhasilan duta besar Amerika Serikat di Negara lain. Kepentingan bisnis kini mengalahkan tujuan lain, seperti ekspor demokrasi dan hak asasi.

Namun bagi sebagian politikus, kepentingan bisnis semata-mata akan membuat kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat kehilangan pesona moral. Menurut mereka, promosi kultur dan tradisi Amerika Serikat seperti kebebasan, demokrasi, hak asasi, dan pemerintahan konstitusional, harus menjadi prioritas utama kebijaksanaan luar negeri, bukan kepentingan bisnis.

Akan makan waktu lama bagi Amerika Serikat untuk menemukan kembali platform kepentingannasionalnya yang baru, sekuat dan sekomprensif ketika Amerika Serikat masih menghadapi Perang Dingin. Sebelum platform itu terbentuk perbedaan pendapat di kalangan tokoh pentingnya atas berbagai isu luar negeri seperti kasus Cina, akan terus berulang, sebab situasi baru menghendaki platform kepentingan nasional yang baru. Ini berlaku bagi Amerika Serikat, juga bagi Negara lain, termasuk Indonesia. *

Fleksibel ?

Salahkah Tony Blair? Ia terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru. Namun sebagaimana Bill Clinton di Amerika Serikat, ia mendatangkan kontroversi yang dilematis. Ia memenangkan pemilihan umum dengan banyak mengadopsi pro-program partai lawan dan meninggalkan platform partainya. Salahkah pemimpin yang berupaya mengikuti selera public seraya meninggalkan keyakinan lamanya?

Sebagaimana dilakukan Bill Clinton, Blair memiliki tim untuk membaca ke-cenderungannya baru public. Tim ini terdiri dari para ahli statistik yang melakukan poll pendapat di masyarakat luas ataupun eksperimen dalam focus grup.

Bersama para ahli strategi, tim ini memberi masukan kepada Blair tentang isu-isu dan visi politik yang disukai public. Juga berbagai saran tentang seberapa jauh Blair harus meninggalkan prinsip lama partai dan mengadopsi visi politik yang baru, agar memperoleh dukungan mayoritas.

Berdasarkan riset itu, Blair mendapat bahan yang penting untuk menulis ulang konstitusi partai, mengubah ideology dan visi partai,serta merumuskan isu-isu baru untuk menarik pendukung. Ia meyakinkan pendukung lama partainya bahwa zaman sudah berubah dan ia harus mengubah visi partai. Ia meyakinkan masyarakat banyak bahwa partai yang dipimpinnya adalah partai dengan wajah baru.

Kini kita hidup di sebuah zaman ketika ideology tidak lagi dikeramatkan dan dipertahankan mati-matian. Zaman berubah cepat. Political mood public juga cepat berganti. Para politikus yang kariernya bergantung pada opini public cenderung memilih keyakinan politik yang pragmatis dan elektis. Berbagai prinsip yang tadinya ditentang dapat diambil dan dimodifikasi karena public mulai menyukainya.tidak penting darimana sumber prinsip itu, dari ideology yang kekiri-kirian atau yang kekanan-kananan, sejauh ia mendapat dukungan politik.

Inilah yang terjadi pada Partai Buruh Inggris. Awalnya partai ini ingin mengkombinasikan program ekonomi sosialisme dengan politik demokrasi. Mereka menginginkan keadilan ekonomi, sebagaimana dijanjikan sosialisme, tetapi tidak menyukai politik totalitarian Negara sosialis seperti Uni soviet. Lalu sejak tahun 1930-an ideology social demokrasi tersebut berkembang menjadi welfare state, yang menghendaki peran aktif pemerintah untuk memajukan ekonomi dan mendistri-busikan kekayaan.

Pada tahun 1960-an mereka mengadopsi prinsip kebudayaan baru sebagai pasangan program politik ekonominya. Di zaman yang dijuluki Flower' s Generation berkembang berbagai sentiment antiestablishment terhadap kemapanan dan agama, serta seruan atas kebebasan. Isu hak asasi, emansipasi wanita, hak minoritas , masyarakat multikultur, dan gerakan homoseksual, serta kultur sekuler tumbuh pesat. prinsip itu menjadi agenda kebudayaan mereka.

Namun sejak decade 1980, dengan tampilnya politikus konservatif Margareth Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, situasi berbalik. Dua figur raksasa ini membawa perubahan mendasar dengan mengubah public mood zamanya untuk lebih konservatif.

Kini sebagian besar doktrin lama buruh itu sudah diluluhlantakkan. Demokrasi dalam sistem ekonomi sosialisme adalah hal yang mustahil. Welfare state dikritik sebagai sumber kebangkrutan ekonomi. Nilai tradisi dan agama yang mereka tentang justru kini tengah bangkit dengan gagah, seperti family values.

Menghadapi perubahan political mood publik ini, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin yang ingin dipilih oleh mayoritas publiknya? haruskah ia bertahan dengan keyakinan lama partai dan berharap suatu ketika akan kembali mengubah political mood public? Jika melarutkan diri dalam selera baru public dan menentang keyakinan lamanya, tidakkah ia berkhianat dan menjadi seorang oportunis?

Tony Blair di Inggris dan Bill Clinton di Amerika Serikat menjawab tidak. Keduanya memilih berubah mengikuti political mood public dan menentang keyakinan lama partainya. Tony Blair dan Bill Clinton mengubah banyak ideology partainya yang kiri (liberal) dan mengadopsi berbagai visi politik yang kanan (konservatif). Dan keduanya memenangkan dalam pemilihan umum.

Blair misalnya, mengumumkan bahwa ia tidak lagi percaya pada prinsip yang dulu menjadi landasan partainya, seperti peran pemerintah yang besar dan program kesejahteraan. Ia menarik jarak dari serikat buruh yang dulu menjadi pendukung utama partainya. Ia memberi tempat untuk kalangan bisnis dan family values, yang dulu hanya menjadi platform partai saingannya. Ia mereformasi total visi partai. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Clinton.

Untuk menjadi politikus yang populer di zaman ini, agaknya orang tidak mungkin lagi bersikap layaknya seorang ideology, yang punya kesetiaan bulat-bulat pada satu ideology. Untuk menjadi pemimpin masyarakat yang beragam, mungkin dituntut sejenis fleksibilitas dalam berhubungan dengan dunia ide, sebagaimana yang ditampakkan Tony Blair.*

Belajar Dari Kasus PDI

Peristiwa yang melanda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) layak membuat kita merenung. Boleh jadi ada yang salah atau setidaknya, ada kebijakan yang tidak lagi sesuai dalam cara kita menangani kehidupan partai politik. Kita, terutama pemerintah, harus lebih kritis dalam mengevaluasi berbagai kebijakannya.

Dalam pemilu 1997 yang baru saja usai, Partai ini hanya memperoleh suara 3,07% dalam sebuah pemilu yang hanya diikuti tiga peserta. Bukan angka ini benar yang menjadi masalah, tetapi angka itu menjadi tanda sesuatu yang lebih mendasar. Partai ini sudah kehilangan legitimasi kehadirannya di masyarakat. Lebih dari 96 persen masyarakat pemilih di Indonesia yang ada, tidak menganggap partai ini penting untuk dipilih.

Sebelumnya, kemelut di partai ini pula yang memicu kerusuhan 27 Juli 1996. Kerusuhan ini, yang bersumber dari persaingan kepemimpinan partai antara Megawati dan Soerjadi, dinilai sebagai

yang terbesar dan dramatis setelah kasus Malari tahun 1974. Buntut dari ketidakpuasan atas cara pemerintah menangani kemelut PDI terus bergulir dan meluas ke berbagai daerah, memberi kontribusi pada berbagai tuntutan di pengadilan, dan aneka kerusuhan lain selama berlangsungnya pemilu.

Dihitung dari nilai ekonomi, boleh jadi angka kerugian akibat aneka ketegangan-politik dan kerusuhan itu belum sebesar kasus Edy Tanzil, misalnya. Dihitung dari korban yang luka atau mati, kasus ini juga tidak sebesar Banjarmasin baru lalu yang meminta korban lebih dari 1000 nyawa. Namun dihitung dari efek psikologis politik yang diakibatkannya, mulai dari kepercayaan atas institusi formal, sampai akumulasi kemarahan dan ketidakpuasan kolektif, peristiwa di atas sungguh sangat mahal. Ia berskala nasional, menyangkut rasa keadilan orang banyak, dan terjadi atas tokoh yang mengakar.

Jelaslah sedikitnya jumlah suara yang mampu diraih PDI tak dapat dipisahkan dari konflik kepemimpinan partai itu. Sedangkan penyelesaian konflik kepemimpinan itu tak dapat dipisahkan pula dari cara pemerintah terlibat. Artikel singkat ini hendak memberi argument dan solusi tentang apa yang seharusnya kita lakukan di depan. Agar terfokus, hanya satu variable yang ingin dielaborasi, yaitu hubungan pemerintah dan partai politik.

Dalam literatur ilmu politik, dikenal banyak model hubungan pemerintah dan partai politik (Sartori, 1970). Untuk bahasan ini kita modifikasi model itu menjadi dua. Sebut saja yang satu model yang berorientasi pada Negara (state centered), dan yang lain model yang berorientasi pada masyarakat (society centered). Dua model ini memiliki dasar pandangannya sendiri, kepentingannya masing-masing, dan menem-patkan peran Negara secara berbeda dalam berhubungan dengan partai politik.

Model yang berorientasi pada negara beranggapan bahwa Negara harus memiliki program ekonomi politiknya sendiri dan sebuah ideology politik nasional. karena pemenuhan program ekonomi politik itu memakan waktu puluhan tahun, diusahakan agar Negara terus berada dalam control yang penuh selama puluhan tahun.

Persoalannya, sistem modern menghendaki adanya pemilihan umum dan had-irnya partai politik yang bersaing. Pemilihan umum itu dilangsungkan secara berkala (sekali empat, lima atau tujuh tahun) dan agar dapat bersaing, partai politik yang ada harus lebih dari satu. Model ini mengadopsi kebutuhan di atas, namun pada saat yang sama ia melakukan modifikasi agar hasil pemilu tetap berada dalam arah politik yang dikontrol Negara.

Solusinya, Negara kemudian mendirikan dan mengontrol partai politik. Satu dari partai itu dijadikan partai favorit (hegemonik), yang lainnya dijadikan partai pelengkap (satelit). Partai hegemonik selalu diupayakan untuk menang pemilu karena partai inilah yang memang dipersiapkan untuk menjamin kontinuitas program ekonomi politik negara.

Agar partai hegemonik terus menang, ketidaksejajaran diciptakan. Partai hegemonik didukung oleh apparatus negara yang lain, seperti birokrasi atau bahkan mili-ter. Partai hegemonik juga memperoleh anggaran lebih banyak secara terselubung. Namun, karena partai satelit selalu mungkin menang, untuk menjamin kontinuitas program ekonomi politik Negara, partai satelit ini juga dikontrol, mulai dari program yang mereka tawarkan sampai pada pemilihan kepemimpinannya.

Dalam konstruksi di atas, pemilu dan kehadiran partai politik tidak menjadi ancaman bagi kelangsungan program Negara. Partai politik, baik yang hegemonik maupun satelit, sepenuhnya bergantung pada

Negara. Legitimasi kehadirannya berada di tangan Negara, lebih dari tangan masyarakat anggotanya.

Sedangkan model yang berorientasi masyarakat punya dasar pikiran yang sa-ma sekali berbeda. Model ini beranggapan bahwa Negara tidak harus punya program ekonomi politik tertentu. Yang punya program itu adalah berbagai kelompok masyarakat yang beragam. Berbagai kelompok itu dibiarkan berkompetisi satu sama lain saling menjajakan program siapa yang sebaiknya diadopsi pada kurun waktu ter-tentu.

Untuk berkompetisi, berbagai kelompok itu mendirikan partai politik. pemilihan umum dijadikan ajang kompetisi berbagai partai politik itu. Siapapun yang dipilih melalui pemilu, diberi kesempatan untuk mengendalikan Negara berdasarkan program ekonomi politiknya. Dalam pemilu berikutnya, sangat mungkin partai politik lain datang dengan program yang berbeda memenangkan kompetisi.

Dalam konstruksi ini, Negara bersikap netral terhadap semua partai politik. Masing-masing partai berdiri sejajar, tidak ada yang dapat fasilitas lebih dari Negara. Berbagai apparatus Negara, seperti birokrasi dan militer, dibuat loyal dan menundukkan diri kepada siapapun yang memenangkan pemilu. Berbagai partai bersifat independen, bebas menentukan pemimpin dan program partainya. Satu-satunya aturan yang mengikat adalah prosedur demokrasi harus dipertahankan, bahwa siapapun yang menang berkewajiban menjalankan lagi pemilu periode berikutnya.

Berdasarkan dua model diatas, hubungan pemerintah dan partai politik di Tanah Air lebih mendeteksi "state centered" , ketimbang "society centered" .Ini tidak dengan sendirinya berarti baik atau buruk, karena penilaian yang adil harus ditimbang berdasarkan konteks dan kondisi historis yang ada.

Namun dapat dikatakan, model apapun dapat dipilih agar stabil, ia menuntut dukungan lingkungan tertentu. Tanpa dukungan itu, model itu akan retak dan menimbulkan banyak ketidakpuasan, kerusuhan dan ketidakpercayaan atas sistem yang ada.

Model state centered agar stabil menuntut adanya persaingan yang sangat terbatas di kalangan elite dan aspirasi politik yang relatif homogeny, serta menghen-daki lapisan massa yang pasif atau mampu dipasifkan. Dengan demikian, peran Negara yang sangat besar dalam mengontrol kehidupan partai politik relatif tidak mendapat perlawanan. Seandainya pun ada ketidakpuasan hal itu hanya terjadi secara sporadis, local dan dengan mudah diatasi.

Stabilitas ini terjadi dalam politik kita di decade 70-an dan 80-an. Namun di decade 90-an, apalagi setelah memasuki tahun 2000, stabilitas model state centered di atas sulit dipertahankan. Penyebabnya, ada satu gelombang yang tidak bisa ditahan oleh satu kekuatan politik apapun, yaitu gelombang pluralisasi akibat berkembangnya ekonomi, pendidikan dan eksposur pada informasi global yang semakin intensif.

Aspirasi politik elite semakin plural dan kompetisi di antara mereka semakin tinggi. Sementara massa semakin aktif dan sadar lebih besar, tapi juga aturan kompetisi yang lebih equal, dan hak-hak otonom dan mandiri dalam berpolitik.

Kegagalan pemerintah dalam menangani kemelut PDI (Megawati vs Soeryadi), Yang berbuntut pada sedikitnya perolehan suara (legitimasi) PDI Soeryadi dapat dibaca dalam perspektif ini. Bukan intervensi pemerintah itu benar yang berbeda, karena di decade sebelumnya pemerintah juga melakukan hal yang sama. Namun masyarakat massa dan elite sudah sedemikian berubah. Mereka tidak dapat lagi menerima apa yang pada dekade sebelumnya, dapat mereka terima.

Merenungkan terpuruknya PDI dalam Pemilu ini memang membawa konsekuensi yang jauh bagi pemerintah. karena situasi sudah berubah, pemerintah sebaiknya pula mampu mengakomodasi perubahan itu, untuk menghindari ketidakpuasan yang semakin meluas.

Pemerintah agaknya sudah mulai melakukan perubahan yang gradual atas par-tai politik, dari yang mengontrol penuh menuju pembebasan secara bertahap. Satu contohnya, sejak saat ini pemerintah sebaiknya membiarkan partai politik itu memilih pemimpinnya sendiri, tanpa secara nyata memberi dukungan kepada satu pihak yang bertikai. Dengan demikian partai itu akan kembali mendapat legitimasi publiknya, demikian juga dengan pemerintah sendiri.*

Politik 1996

Apa yang terjadi dengan politik Indonesia sepanjang tahun 1996? Jawabannya sederhana : terjadi sebuah pembalikan kecenderungan. Berbagai gerakan yang mengidentifikasi diri sebagai gerakan prodemokrasi dan aksi protes mengalami pelemahan. Awal dari pelemahan ini adalah huru-hara 27 Juli 1996. Sebaliknya format politik Orde Baru yang ingin diubah gerakan ini justru mengalami konsolidasi dan makin kuat. Mengapa gerakan prodemokrasi itu gagal?

Sejak akhir 1995, gerakan prodemokrasi mulai ramai dengan beberapa gejala. Pertama, lahirnya berbagai kelompok baru, baik yang mengklaim sebagai lembaga swadaya masyarakat, yayasan social, maupun partai politik. Berbagai nama kelompok bertaburan dengan hiruk pikuk masing-masing: mulai PNI baru, Masyumi Baru, Partai Rakyat Demokratik, sampai Komite Independen Pengawas Pemilu. Berbagai tokoh masyarakat terlibat dalam antusiasme kelompok baru itu: mulai dari purnawirawan ABRI, mantan pemimpin

redaksi, politisi senior, buruh, intelektual ternama, sampai aktivis mahasiswa. Kesan cepat pun lahir. Ini gejala bangkitnya civil society yang pada waktunya akan menuntut dan melahirkan demokrasi di Indonesia.

Kedua, makin menyatunya gerakan itu di bawah satu pemimpin. Sejak awal 1996, nama Megawati mulai memasuki pentas politik nasional sebagai pemimpin alternatif. Mitos atas Megawati mulai lahir. Ia mulai dihubungkan dengan Cory Aquino yang memimpin perubahan di Filipina. Sungguh pun Megawati belum menunjukkan kepiawaiannya dalam politik praktis, simbolnya sebagai pemersatu dan pembawa moralitas baru dalam politik makin dalam. Kesan yang lahir makin kuat lagi bahwa gerakan demokrasi di Indonesia sudah tiba waktunya .

Ketiga, adalah makin menajamnya isu politik. Tuntutan agar pemerintah meninjau kembali lima paket Undang-undang Politik makin bergema. Undang-undang itu, yang antara lain membatasi partai politik, mengontrol organisasi masyarakat, dan menata pemilihan umum serta DPR, dianggap fondasi dari format politik Orde Baru. Terbatasnya aspirasi politik masyarakat dianggap dilegitimasi secara hukum oleh undang-undang itu. Di sisi lain, isu suksesi presiden makin kuat dihembuskan. Isu ini menambah kesan bahwa gerakan demokrasi akhirnya memang akan sampai juga di Indonesia.

Namun, huru-hara 27 Juli 1996 membalikkan semua kecenderungan di atas. Pembakaran gedung dan potensi kerusuhan politik akibat huru-hara itu menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan control atas berbagai kelompok masyarakat. Pelemahan kekuatan masyarakat di atas itu pun terjadi. Sebagian dari mereka menjadi terdakwa di sidang pengadilan dengan ancaman hukuman penjara. Sebagian dari kelompok itu juga dilabel sebagai

lembaga yang bermasalah. Spirit per-lawanan pun menurun akibat direduksinya basis kekuatan politik mereka.

Pertanyaan yang lebih akademis yang muncul : mengapa gerakan itu gagal di Indonesia, padahal gerakan yang sama berhasil di berbagai dunia ketiga lainnya? Mengapa format politik Orde Baru justru mengalami konsolidasi dan tidak berhasil ditekan untuk bertransisi menuju demokrasi, sebagaimana diminta berbagai kelompok masyarakat di atas?

Menarik untuk disimak penelitian Haggard dan Kaufman (1996) untuk dikaitkan dengan situasi politik di Indonesia. Dua ilmuwan itu melakukan penelitian empiris atas 12 negara yang berhasil bertransisi ke demokrasi sejak tiga decade ini, di samping beberapa negara yang tetap otoritarian.

Dua dari banyak factor yang Haggard dan Kaufman anggap paling menentukan perubahan politik adalah krisis ekonomi dan kekuatan lembaga eksekutif. Krisis ekonomi dapat membuat konstelasi politik berubah akibat berkurangnya insentif dan profit ekonomi yang dapat diberikan sistem itu ke berbagai kelompok politik. Kelompok elit yang sedang berkuasa dengan mudah mengalami fragmentasi dan konflik internal. Massa makin mudah diradikalisasi. Sementara itu oposisi, yang mempunyai program mengubah sistem, mendapat daya tarik yang lebih besar.

Namun perubahan sistem tidak cukup kuat didorong jika lembaga eksekutif sistem lama masih mampu mengontrol kekuatan politik utama. Dari kasus yang diteliti Haggard dan Kaufman, kekuatan terpenting bagi lembaga eksekutif adalah dukungan militer dan peran partai politik. Selama partai politik yang berkuasa masih mampu mengkooptasi dan dukungan militer terjaga, konsolidasi sistem lama juga terjaga.

Dua hal di ataslah yang dapat menjelaskan mengapa gerakan prodemokrasi di Indonesia tahun itu bukan saja tidak berhasil, melainkan juga mengalami pelemahan. Gairah politik di kalangan masyarakat luas tidak bertemu dengan krisis ekonomi nasional. Akibatnya, kelompok yang ingin terlibat dalam perubahan sangat terbatas karena kenyamanan ekonomi yang dapat diberikan sistem. Di samping itu, lembaga eksekutif masih sangat kuat. Wibawa Soeharto begitu tinggi dan berhasil menyatukan bukan saja militer dan Golkar sebagai partai yang berkuasa, melainkan juga kelompok dominan masyarakat, seperti kelompok Islam.

Tamatkah gerakan prodemokrasi di Indonesia? yang frontal boleh jadi memang melemah, tetapi tidak dengan gerakan reformasi yang lebih sabar dan strategis, dengan memilih perubahan perlahan dan bekerja sama dengan reformis yang berada di tubuh pemerintahan sendiri, sebagaimana terjadi di banyak Negara lain.*

Iklan Politik

Politik kini memasuki era baru. Ini kesan paling kuat yang timbul setelah menyaksikan pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, maret 1996. Di era panglima Alexander the Great dan Napoleon, untuk memperbesar pengaruh dan me-menangkan dukungan politik diperlukan meriam dan bedil. Namun di abad informasi di Amerika Serikat, untuk memenangkan pengaruh dan dukungan, yang diperlukan adalah iklan di televisi. Aktor utama di balik pertarungan politik bukan lagi jenderal perang, melainkan konsultan marketing.

Bulan Maret 1996, di Amerika Serikat, Partai democrat dan Partai Republik memilih kandidat calon presiden yang akan dipertarungkan pada November 1996. Calon itu kini sudah terpilih. Partai Demokrat tetap mencalonkan Presiden Clinton. Sedangkan Partai Republik mencalonkan Bob Dole, yang kini masih menjabat Ketua Mayoritas Senat Amerika Serikat.

Proses pemilihan itu yang menarik. Di televisi bersama-sama dengan iklan sepatu, susu, mobil, ataupun computer, muncul berbagai iklan politik dari para calon presiden, mulai dari Bob Dole, Pat Buchanan, Steve Forbes, sampai Lamar Alexan-der. Para ahli strategi mengemas calon mereka untuk menarik rakyat pemilih sebagaimana layaknya para ahli marketing mengemas produk pabrik agar dibeli kon-sumen. Perang iklan diantara para calon presiden berlangsung tidak berbeda dengan perang iklan antara IBM dan Apple, perusahaan telepon AT&T dan Mcr., Pepsi Cola dan Coca caola serta diantara aneka merk pizza.

Iklan politik Bob Dole misalnya, ingin mengesankan figure Bob Dole sebagai pahlawan Amerika Serikat. Digambarkan saat-saat ia mengabdikan diri kepada negaranya dalam Perang Dunia II, yang berakibatkan cacat fisik di tangan kanannya. adegan yang lain menggambarkan betapa ia sebagai pemimpin telah dites berkali-kali dengan aneka posisi di pemerintahan, dipercaya karakter dan kejujurannya, serta kaya akan pengalaman. Iklan ini diakhiri dengan pesan singkat: Bob Dole for President.

Perang iklan yang menunjukkan kelemahan lawan politiknya juga beredar. Bob Dole misalnya, mengiklankan kelemahan Pat Buchanan dan Steve Forbes. Pat Buchanan ia iklankan sebagai politikus yang terlalu ekstrem untuk politik Amerika Serikat. Berbagai pandangan Pat Buchanan terutama opininya terhadap wanita yang agar inferior, diiklankan berulang-ulang. Sedangkan Steve Forbes ia iklankan sebagai pendatang baru yang belum berpengalaman. Kepemimpinannya di bidang politik be-lum pernah di tes.

Melalui iklan, Steve forbes ataupun Pat Buchanan pun menyerang Bob Dole. Bob Dole dianggap sejenis the death fish in the water yang tidak memiliki visi yang jelas bagi masa depan Amerika Serikat. Rekor Bob Dole yang tidak konsisten ingin menurunkan pajak tetapi justru mendukung beberapa kali kenaikan pajak, juga beru-lang-ulang

diiklankan. Bob Dole dikesankan tidak mungkin dapat membuat perubahan karena ia sendiri adalah bagian dari status quo.

Penjelasan lebih jauh tentang iklanpolitik ini diurai Bruce Newman (1994). Ia menulis buku *The Marketing of The President: Political Marketing as Campaign Startegy*. Ia menggambarkan, sebagaimana dunia bisnis, kini kampanye politik juga menggunakan prinsip-prinsip marketing, seperti marketing research, market segmentation, targeting, positioning, strategy development, dan implementation.

Para ahli marketing memutuskan apa yang harus mereka "jual" dari sang calon presiden. Dengan bantuan para pollster (ahli jajak pendapat), mereka membuat profil rakyat pemilih di berbagai Negara bagian. Profil itu menggambarkan apa yang sedang menjadi kegelisahan dan harapan rakyat pemilih dari berbagai kategori umur, pendapatan, dan kelompok social. Kualifikasi pemimpin yang bagaimana pun yang mereka harapkan.

Bersama dengan ideology, lalu ahli marketing itu mengemas dan menerjemahkan visi politik sang calon untuk diiklankan sesuai dengan profil itu. Berdasarkan prinsip marketing, diputuskan isu apa yang harus diiklankan di Negara bagian tertentu, para ahli busana juga dilibatkan agar penampilan sang calon makin meyakinkan. Gerak calon presiden lain juga terus diamati. Iklan politik dari lawan yang menyudutkan dijawab dengan iklan politik lainnya.

Tidaklah mengherankan jika pemilihan presiden di Amerika Serikat menjadi sangat mahal. Menurut Time (25 Maret 1996), selama masa kampanye tahun ini Steve Forbes menghabiskan sekitar Rp 65 milyar (US\$ 30 juta). Bob Dole menguras dana sebesar Rp 60 milyar (US\$27 juta), sedangkan Pat Buchanan sebesar Rp 24 milyar (US\$ 11juta). Kitapun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tengah terjadi? Mengapa politik demokrasi modern sampai ke tahap itu dan menjadi mahal? Penyebabnya adalah substansi dari demokrasi itu

sendiri. Demokrasi meletakkan kekuasaan di tangan rakyat banyak, bukan segelintir elit. Untuk memperoleh kekuasaan, setiap politikus harus berbicara kepada rakyat pemilih. Makin banyak dan luas masyarakat yang harus dijangkau dan diyakinkan, akan makin mahal biaya yang harus dikeluarkan.

Di samping itu televisi sudah berkembang sedemikian rupa. Hampir di setiap rumah tangga ada televisi. Iklan politik di televisi menjadi sangat efektif untuk menjangkau rakyat pemilih. Bagi pengelola televisi, tidaklah penting apakah itu iklan politik atau bisnis. Mereka membebaskan tarif untuk panjangnya waktu iklan, bukan jenis iklan. Tarif untuk iklan politik akan sama mahalannya dengan tarif iklan bisnis jika waktu yang digunakan sama. Perang iklan politik antar calon presiden di televisi membuat biaya kampanye melambung tinggi.

Ditambah lagi, dalam demokrasi hanya persuasi yang diizinkan dan prosedur pemilihan calon juga bersih. Intimidasi dan paksaan serta kecurangan pemilihan dianggap tindakan kriminal dalam politik. Untuk terpilihnya tidak bisa tidak sang calon presiden akhirnya hanya bergantung pada strategi persuasi. Makin cerdas rakyat pemilih, strategi persuasi harus makin canggih pula. Berbagai konsultan pun dilibatkan untuk merumuskan strategi persuasi yang tepat, mulai dari ahli marketing, ideology, penulis pidato, ahli statistic, sampai perancang busana. Honor para ahli ini juga mahal.

Karena uang menjadi sangat sentral dalam proses politik ini, ada aturan dan batasan jumlah sumbangan yang boleh diberikan sebuah perusahaan kepada calon presiden. Penyimpangan terhadap aturan main akan dengan mudah dibongkar oleh berbagai pihak.

Akankah untuk pertama kali iklan politik dari pihak yang bersaing mengisi televisi kita? Ataukah di negeri kita iklan politik itu sebenarnya sudah berlangsung namun terselubung dan hanya sepihak? *

Reformasi

Siapa kini yang harus didengar Megawati? Awal Oktober 1996, Gus Dur, yang ia anggap sebagai kakak dan sahabat, sudah memberikan imbauan terbuka. Langkah Megawati, ujar Gus Dur, sebaiknya dihentikan. Menuntut banyak pejabat tinggi pemerintah ke pengadilan, menurut Gus Dur, sudah menggeser persoalan, dari koreksi atas masalah internal PDI, ke arah konflik yang lebih luas. Harga yang akan dibayar dapat mahal sekali, karena konflik yang diakibatkannya makin dalam dan bersifat nasional.

Saran Gus Dur, ada baiknya Megawati kini berdiam diri dulu. Diam itu pun sudah merupakan perlawanan. Pada akhirnya, ujar Gus Dur lagi, Megawati juga akan diminta kembali untuk terlibat dalam pembangunan nasional karena dukungan massa yang ia punya.

Namun Arief Budiman, rekan seperguruan Gus Dur di Forum Demokrasi, memberi imbauan politik yang sebaliknya. Menuntut secara hukum pejabat tinggi pemerintahan, menurut Arief, adalah

langkah efektif. Walau Megawati akan dikalah-kan, pengadilan dapat menjadi ajang pendidikan politik yang baik bagi banyak orang. Di sana berbagai penyimpangan politik, ujar Arief, akan dipertontonkan. Pers pun akan mengulas dan menginformasikannya. Upaya perlawanan hukum Megawati sangat berharga bagi perubahan politik jangka panjang.

Siapakah yang harus diikuti Megawati untuk reformasi politik? Gus Dur atau Arief Budiman? Jawabannya mungkin tidak keduanya. Yang harus didengar Megawati sekarang mungkin bukan tokoh politik seperti Gus Dur atau pengamat sep-erti Arief Budiman, tetapi peneliti lapangan professional. Orang itu adalah Samuel Huntington, pakar politik yang banyak melakukan riset tentang demokratisasi.

Huntington (1991) melakukan studi atas 35 negara yang melakukan reformasi politik ke arah demokratisasi sejak 1974. Ia menemukan adanya tiga pola utama reformasi yang dapat dibedakan berdasarkan pelaku utama dan kondisi politik setempat. Dari hasil penelitian ini Megawati dapat merenungkan kembali berbagai langkahnya.

Pertama, adalah pola transformasi. Pelaku utama perubahan adalah para pem-baharu yang sedang duduk di pemerintahan. Penyebab perubahan dapat beragam. Reformasi politik mungkin satu-satunya solusi untuk meluaskan legitimasi. Kebutuhan baru ini direspon agar makin banyak dukungan yang didapat. Mungkin juga ini berlangsung dalam rangka memperoleh sokongan ataupun menghindari tekanan in-ternasional. Apalagi dalam era seperti sekarang, ketika demokrasi dan hak asasi makin menjadi peribahasa standard dan etika global.

Menurut Huntington, ada sekitar 16 dari 35 negara (47%) yang melakukan reformasi politik dengan pola transformasi. Contohnya

antara lain transformasi Brasil di bawah reformer Figueredo dalam kurun waktu Maret 1979 sampai 1985. Kondisi yang mencolok dari pola transformasi adalah pemerintah yang jauh lebih kuat dibanding dengan oposisi.

Kedua, adalah pola replacement. Dalam situasi ini, legitimasi pemerintah merosot secara kualitatif. Ini disebabkan kerusakan ekonomi nasional yang parah. Atau adanya imoralitas di kalangan pemerintahan, seperti terbongkarnya skandal korupsi-besar-besaran. Atau ideology Negara mengalami krisis, tidak lagi mampu memecahkan persoalan.

Dalam kondisi itu, pemerintah mengalami pembusukan, pelemahan dan makin tidak populer. sebaliknya, kelompok oposisi menyatu dan menguat. Melalui pergolakan politik, seperti people power, kaum oposisi memimpin perubahan dan mengambil alih pemerintahan. Reformasi politik ke arah demokratisasi pun dimulai.

Menurut Huntington, ada 6 dari 35 negara (19%) yang melakukan reformasi dengan pola ini. Antara lain, Filipina di bawah oposisi Cory Aquino, serta Jerman Timur dan Rumania, yang terjadi pada paruh akhir 1980-an

Ketiga, adalah pola transplacement. Dalam kondisi ini krisis sistem politik memang terjadi yang ditandai oleh pemerintahan yang tidak terlalu kuat untuk bertahan terhadap krisis tetapi tidak pula mampu memimpin perubahan sendirian. sebaliknya oposisi pun meski tidak kuat namun tidak terlalu mudah untuk disingkirkan. dalam situasi seperti ini elemen progresif di pemerintahan akan bekerja sama dengan tokoh oposisi untuk memimpin reformasi kearah demokratisasi.

Huntington mencatat sebanyak 11 dari 35 negara (32%) yang menempuh reformasi dengan pola ini. Contohnya antara lain, afrika

Selatan ketika pemerintah (De Klerk) bekerja sama dengan tokoh oposisi (Nelson Mandela) pada 1989 memulai reformasi.

Dari kasus reformasi yang dikaji Huntington di atas, sebanyak 27 dari 35 kasus (80%) terjadi dengan melibatkan para reformer di tubuh pemerintahan sendiri. Dari data lapangan itu terlihat bahwa para reformer di tubuh pemerintah ternyata memimpin dan mendominasi pola reformasi politik, bukan oposisi.

Dalam kondisi pemerintahan yang kuat dan oposisi lemah, tidak mungkin oposisi itu mampu melakukan reformasi sendirian. Oposisi yang lemah yang memaksakan konfrontasi justru dapat menjadi kontraproduktif. Sistem politik keseluruhannya dapat lebih represif untuk menghindari timbulnya gerakan oposisi serupa di kemudian hari. Kekerasan politik pun akan mudah terpancing akibat konfrontasi yang acap emosional.

Sistem politik kita pun berada dalam posisi yang sama. Pemerintah terlalu kuat, oposisi terlalu lemah. Berdasarkan studi lapangan Huntington, untuk mengawali reformasi politik yang berhasil dalam kondisi Indonesia saat ini, jauh lebih mungkin jika Megawati bergandengan dengan para reformer yang masih berada dalam kekuasaan resmi. Lalu membangun jaringan bersama untuk memimpin perubahan secara perlahan dan terkendali. Dalam posisi yang lemah, tidak banyak hasilnya jika Megawati berdiri di luar dan melakukan konfrontasi total.

Konfrontasi dalam posisi lemah atas kekuasaan resmi hanya memberikan kesan keberanian moral yang teguh. Namun, reformasi politik yang sesungguhnya meminta kalkulasi politik yang lebih strategis. Atau mungkinkah Megawati tengah berharap munculnya surprise, di luar dugaan pengamat konvensional? *

Politik Megawati

Dimana idealnya tempat Megawati dalam format politik Indonesia? Posisi apa yang mungkin ia capai dan peran apa yang seharusnya ia mainkan? mungkinkah ia pada akhirnya dicatat sejarah berdiri sejajar di samping Cory Aquino dan Benazir Bhutto? Pertanyaan ini seketika berkeliaran di kepala setelah saya membaca berita tentangnya. Berita yang paling actual dan sensasional: Megawati mungkin dicalonkan sebagai presiden oleh partainya, PDI.

Tidak banyak pemimpin di Tanah Air yang seberuntung Megawati. Kehadirannya dalam pentas nasional terhitung belum lama. Namun, ia sudah menempati posisi khusus, membawa kegairahan baru, serta menjadi pusat berita. Ia menjadi wanita pertama yang memimpin partai politik sepanjang sejarah Orde Baru. Lebih dari itu, ia pemimpin partai yang terpilih karena desakan arus bawah dan bertahan walau terus digoyang lawan politiknya dan dihantam aneka isu.

Jika pencalonannya sebagai presiden menjadi kenyataan walaupun ia tak ter-pilih, niscaya ia menjadi orang pertama pula yang berkompetisi dalam pemilihan presiden sepanjang sejarah Indonesia. Ini berarti ia tak hanya hadir dalam sejarah, melainkan juga membuat sejarah.

Namun kini Megawati berada pas di titik jalan yang bercabang dua. Jalan ma-na yang ia tempuh akan menentukan tidak hanya karier politik pribadinya, melainkan juga kondisi politik nasional. oleh lingkungannya boleh jadi ia diarahkan untuk me-mainkan peran politik sebagaimana yang dimainkan Coryy Aquino dalam periode Agustus 1983 sampai Februari 1986 di Filipina. Bulan agustus 1983, Ninoy, suami Cory, tewas terbunuh. Februari 1986 Cory menjadi presiden di negeri itu. Para peri-ode semenjak suaminya meninggal hingga dia menjadi Presiden, Cory berubah dari ibu rumah tangga menjadi pemimpin simbolik koalisi perubahan dan akhirnya menjadi pemimpin resmi Negara.

Sebagaimana Megawati, cory juga seorang ibu rumah tangga biasa yang awalnya jauh dari gegap gempita politik. Current Biography Yearbook (1986) bahkan melukiskannya sebagai Classical Oriental Wife, seorang ibu rumah tangga tipe tradi-sional Timur. Suaminya memang seorang politikus ulung, gubernur, dan senator ter-muda dalam sejarah Filipina. Namun jika suaminya diibaratkan panglima perang, Cory hanya merawat pedang dan menjaga kuda sang panglima.

Situasi social kemudian membimbing Cory ke arah yang tidak terduga. kekuatan oposisi di Filipina kala itubegitu lemah dan terpecah. Ketika Marcos mengumumkan bahwa pemilihan presiden akan diadakan 5 November 1985, mereka yang gandrung perubahan kekuasaan memerlukan satu pemimpin. Tanpa satu ko-mando , suara mereka akan terpecah dan sulit mengalahkan Marcos.

Persooralannya di tubuh oposisi Filipina terlalu banyak pemimpin dan sedikit "prajurit" . Yang satu tidak ingin menjadi bawahan yang lain. Satu-satunya cara adalah mencari pemimpin simbolik yang dapat menyatukan mereka. Salvador Laurel, sungguhpun sangat lihai dan berpengalaman sebagai politikus serta memimpin Unido (partai oposisi terbesar), tetap dianggap tidak memadai untuk memimpin koalisi. Cory Aquino pun dipilih, bukan karena pengalaman politiknya, melainkan symbol moralnya.

Aneka keberuntungan lalu menyertai Cory. Keluguan politiknya malah men-jadi sumber kekuatannya di saat politik sudah begitu tercemar. Ia membawa gairah baru. Para aktivis independen membentuk lembaga pengawas pemilu (NAM-FREL) agar tak dicurangi. Cory pun tampil sebagai alternatif moral. People power kemudian membawa Cory ke puncak.

Mungkinkah Megawati memilih peran Cory Aquino lalu mengulangi kisah suksesnya? Megawati memang dapat memainkan symbol moral yang sama. Namun situasi politik Indonesia 1996-1997 agaknya berbeda dengan Filipina 1985-1986. Saat itu Filipina mempunyai seorang pemimpin agama yang dihormati, Kardinal Sin, yang berdiri di belakang Cory. Fenomena moral yang dibawa Cory bercampur dengan gairah agama massa. Satu koalisi besar pun terbentuk solid, menggelinding, membesar bagai bola salju, dan menarik dukungan massa. Baik karena alasan politik maupun agama. Gereja sendiri bbukan hanya menarik jarak dari kekuasaan tetapi juga mulai mengkritik struktur kekuasaan yang ada.

Situasi di Indonesia pada 1996 memperlihatkan arah yang berbeda dengan yang terjadi di Filipina. Kekuatan politik Islam sebagai kelompok agama yang domi-nan, melalui ICMI, justru sedang memulai tahap baru. Mereka bukan saja tidak menarik jarak, melainkan sedang bertaut dengan sistem yang ada, mencoba perubahan bertahap dari dalam. Sebagai pilihan politik, sikap ini pun

tidak dapat disalahkan. Ia juga merupakan sebuah eksperimen untuk turut mempengaruhi kebijaksanaan. Mereka punya hak memilih yang sama dengan pihak lain yang memilih sebaliknya. Yang jelas, koalisi masyarakat yang menarik jarak dari sistem agaknya sulit menarik kelompok Islam di ICMI sebagai mitra politiknya.

Bagaimana dengan kelompok Islam di luar ICMI? Memang ada Gus Dur yang dapat mendukung Megawati. Tetapi pengaruh Gus Dur di kalangan Islam di Indonesia sangat berbeda dengan Kardinal Sin bagi Katolik di Filipina. Apalagi saat itu ada krisis internal di tubuh NU yang menyulitkan posisi Gus Dur sendiri. Dukungan kelompok Islam di NU pun secara utuh belum tentu didapat. Tanpa dukungan kekuatan Islam yang terorganisir, kisah sukses seperti Cory Aquino sulit terjadi di sini. kekuatan dominan dalam politik masyarakat sendiri bahkan sangat mungkin terbelah dan saling berhadapan. Gerakan sejenis *people power* menjadi sangat riskan. Ia dapat menjadi arena pergesekan antara kelompok masyarakat sendiri yang dua-duanya menginginkan perubahan tetapi berbeda dalam pilihan strategi. Yang satu bekerjasama, yang satu beroposisi dengan pemerintah.

Kini Megawati benar-benar hidup dalam politik riil. Tarik-menarik kekuatan dan tekanan ia rasakan secara langsung. Pilihan yang ada sama-sama sulit dan beresiko. Isu calon presiden boleh jadi merupakan persoalan yang paling dilematis yang pernah ia hadapi selaku pemimpin: memilih antara inovasi politik yang berdampak jauh dan kalukulasi politik rasional. Pendukungnya berharap ia memimpin semacam kesatuan aksi perubahan, namun konstelasi politik riil mengikat kakinya.

Mungkinkah berbagi keberuntungan yang telah membawa Megawati ke pentas politik nasional masih menyertainya? Misalnya, ia membuat langkah yang sangat kreatif dan kondisi kemudian berubah berpihak kepadanya, lalu ia pun akan dikenang sebagai

salah satu innovator politik nasional? atau malah ini menjadi awal ke-jatuhannya? Pilihan pribadi dan kreativitas Megawati yang masih terbuka atas isu calon presiden itu akan menentukan tidak hanya karir politik kelompok pen-dukungnya, melainkan juga yang lebih mendasar lagi: citra dan aroma Megawati sendiri. *

BAB IV
**Isu Seputar Krisis Ekonomi
dan Politik**

Perhatian Amerika Serikat

MENGAPA Pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian sangat serius terhadap krisis yang terjadi di Indonesia 1998? Tak kurang dari presiden Clinton yang menelpon Presiden Soeharto untuk memastikan bahwa program Dana Moneter Inter-nasional (IMF) akan dilaksanakan secara konsisten.

Pemerintah AS juga mengirimkan pejabat tingginya, Lawrence Summers dan Menteri Pertahanan William Cohen, ke Jakarta. Seperti diberitakan Washington Post, ini merupakan perhatian terbesar yang pernah diberikan Pemerintah AS terhadap Indonesia sejak 1965.

Setelah inisiatif Pemerintah AS, berbagai Negara lain yang merupakan aliansi kuat Amerika Serikat pula terlibat. Perdana Menteri Jerman, Jepang, dan Australia secara pribadi menyempatkan diri menelpon Presiden Soeharto. Pemerintah AS juga menggerakkan IMF untuk makin aktif dan agresif membantu Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, IMF mengirimkan dua pejabat paling tinggi ke Jakarta, Stanley Fisher dan Michel Camdessus.

Media masa di AS tidak kalah semarak memberitakan krisis di Indonesia. di halaman muka Koran yang berpengaruh di Negeri Paman Sam itu, misalnya The New York Times, ditampilkan foto tentang ratusan ibu rumah tangga yang antre membeli bahan pokok di pasar swalayan, tentang kesepakatan baru Indonesia dan IMF mengenai revisi Rancangan Anggaran dan Belanja Negara dan sebagainya.

Perhatian media masa AS atas krisis di Indonesia mungkin tidak istimewa. Media massa boleh jadi hanya tertarik karena ada unsur sensasional dan dramatis da-lam krisis tersebut. meski demikian, perhatian istimewa Pemerintah AS tentu saja berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.

Jeffrey E. Garten (1997) menulis buku menarik yang dapat menjelaskannya lebih detail. Mantan penasihat bisnis Presiden Bill Clinton ini berpendapat dunia pas-ca perang Dingin mempunyai peta kekuatan baru. Di luar AS, di samping ada masyarakat Eropa dan Jepang, kini tengah muncul Big Emerging Markets (BEMs). Garten menyebutkan 10 negara yang menjadi bagian BEMs dan Indonesia adalah sa-lah satunya. Di samping Indonesia, Negara-negara BEMs itu adalah Meksiko, Brasil, Argentina, Afrika Selatan, Polandia, Turki, India, Cina, dan Korea Selatan.

Menurut garten, 10 negara BEMs ini akan mengubah situasi politik dan ekonomi global. Tiap-tiap Negara ini penting secara individual, dan jauh lebih penting lagi sebagai sebuah grup. Kondisi di Negara-negara tersebut, cepat atau lambat, dapat mempengaruhi kepentingan AS, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Negara BEMs memiliki kesamaan karakter. Mereka, mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, pasar yang luas, dan potensi sumber daya yang amat banyak. Tiap-tiap Negara tersebut kini sedang mencari tempat yang pantas dalam hi-erarki dunia. Mereka

mempunyai sentiment nasional yang tinggi, ingin lebih didengar secara politik, dan ingin memperoleh jatah kue ekonomi global yang lebih besar. mereka tengah tumbuh, mengenyam pendidikan ala Barat, dan mengembangkan teknologi terbaru. Para pekerjanya mampu menghasilkan produk yang sekualitas dengan produk AS, tetapi dengan harga yang lebih murah, karena mereka mendapatkan gaji lebih rendah. Situasi ini akan mengubah distribusi investasi global pada masa mendatang.

Bagi garten, Negara BEMs tidak hanya penting secara ekonomi, melainkan juga secara politik dan keamanan, terutama akibat pengaruhnya yang besar atas negara tetangga. Brasil, misalnya, adalah pemimpin blog perdagangan Mercosur di Amerika Latin, yang mencakup Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, dan Chile. Apa pun yang terjadi di Brasil akan mempengaruhi Negara-negara tersebut. demikian halnya dengan Cina. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Dunia (1,2 milyar penduduk), Cina akan terus berkembang menjadi salah satu super power dunia dan menjadi pusat Asia.

Indonesia dinilai Garten juga tidak kalah pentingnya. Dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta, Indonesia adalah pusat ASEAN yang mencakup berbagai Negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Niscaya, kondisi di Indonesia akan mempengaruhi Negara tetangganya, yang jika digabungkan berjumlah 414 juta penduduk, dengan total GDP di atas US\$ 500 milyar.

Sepuluh Negara BEMs ini, termasuk Indonesia, sangat penting bagi AS. Dari segi ekspor perdagangan saja, menurut Garten, sekarang AS lebih banyak mengekspor barang seluruh Negara Eropa dan Jepang. Pada decade mendatang, porsi itu dapat bertambah. Dari segi pertahanan dan ongkos keamanan, AS akan menghemat jutaan dollar jika setiap Negara BEMs mampu memelihara stabilitas regional di wilayah masing-masing. Ini berarti, AS tidak perlu

lagi mengirimkan operasi militer dan melakukan tambahan kerja diplomasi untuk turut menstabilkan wilayah regional itu.

Perdagangan AS dengan 10 negara BEMs, dan dunia lainnya, menurut Garten, makin penting. Total ekspor AS sudah memberikan pekerjaan kepada 11 juta warga AS. Selama empat tahun belakangan, porsi ekspor keseluruhan ekonomi AS meningkat tiga kali lebih cepat daripada dan jasa AS. Berbagai penjualan barang dan jasa AS ke dunia luar menyumbang sepertiga bagian dari pertumbuhan ekonominya. Diperkirakan, pada tahun 2000, 16 juta pekerja AS bergantung pada kegiatan ekspor dan 30% dari GDP-nya berasal dari sana.

Niscaya, kondidi ekonomi dan politik Indonesia sebagai salah satu Negara BEMs sangat penting bagi kepentingan nasional AS. Tidak mengherankan jika Pemerintah AS memberikan perhatian sangat serius terhadap Indonesia, karena ke-makmuran AS dipengaruhi kemakmuran Negara-negara BEMs. Mungkin ini adalah jenis ketergantungan yang saling menguntungkan. *

Sidang MPR dan Konflik Elite

SEBERAPA jauh sidang MPR 1998 dapat turut menyelesaikan konflik elit politik? Krisis yang dialami Negara kita menjadi berat dan berlarut bukan semata karena adanya kemunduran ekonomi yang dasyat. Juga bukan semata karena belum kuatnya legitimasi politik pimpinan nasional yang baru. Krisis menjadi berat karena dua hal di atas terjadi dalam kondisi para elit politik berkonflik dan belum menemukan kesepakatan baru.

Konflik elite dapat terjadi di berbagai tindakan. Konflik itu dapat terjadi secara vertical, antara elite di pemerintahan dan elite di masyarakat. Konflik juga dapat berlangsung secara horizontal, antara elit di dalam masyarakat itu sendiri. Yang paling parah, jika konflik itu terjadi secara serentak, vertical dan horizontal, seperti yang sekarang terjadi di tanah air.

Konflik elite yang tidak diselesaikan bukan saja membuat kondisi politik tidak stabil, rentan terhadap aneka kerusuhan, aksi protes

dan maneuver kekerasan. Konflik itu dapat membawa Negara berada dalam krisis yang berkepanjangan, dan memundurkan pencapaian ekonomi dan politik beberapa generasi ke belakang. Tulisan ini ingin menyoroti konflik elite yang ada berdasarkan literatur politik mutakhir. kemudian tulisan ini mencari solusi atas konflik elite itu, menghubungkannya dengan Sidang Istimewa MPR dan upaya transisi menuju demokrasi.

Adalah John Higley dan Michael G. Burton (1987) yang menghidupkan kembali teori konflik elite dalam hubungannya dengan transisi menuju demokrasi. Mereka membedakan tiga tahap struktur elit dalam proses transisi itu: pertama elite yang bersatu secara ideologis; kedua, elite yang berkonflik; ketiga, elite yang berkompetisi dalam prosedur demokrasi.

Elite yang bersatu secara ideologis terjadi dalam Negara otoriter. Dalam rezim yang otoriter, mayoritas elite yang kuat secara politik umumnya menjadi anggota par-tai politik yang sama, mendukung kebijakan public yang sama, dan menunjukkan loyalitas kepada pimpinan yang sama. Dalam situasi ini, politik sangat stabil namun partisipasi politik yang luas tidak terjadi. Bersatunya elite dalam Negara otoriter dianggap bukan proses yang murni dan sukarela, namun dibentuk di bawah sistem yang represif. Secara rasional, para elite itu memilih untuk bersatu karena hanya melalui penyatuan diri dengan irama Negara otoriter itu kepentingan politik mereka terlindungi.

Namun bersatunya elite secara ideologis ini tidak akan bertahan lama. penyatuan itu dianggap menentang hakikat masyarakat modern yang beragam. Pada saatnya, elite yang bersatu itu pecah dan berkonflik satu sama lain. Dalam tahap per-pecahan, para elite secara public mulai menunjukkan perbedaan. Mereka bukan saja berbeda

dalam orientasi politiknya, namun juga mulai menjadi anggota partai yang berbeda dan mendukung pimpinan yang berbeda pula.

Konflik elite ini dianggap situasi yang tidak terhindarkan agar keluar dari negara otoriter. Hanya melalui konflik elite yang serius Negara otoriter menjadi rapuh dan kemudian jatuh. Konflik elite di satu sisi berjasa dalam pelumpuhan Negara otoriter. Namun, di sisi lain ia juga berbahaya. Jika konflik elite itu berlarut, Negara selalu dalam keadaan krisis yang membuat politik tidak stabil. Jauh lebih berbahaya lagi, konflik elite yang berkepanjangan dapat membuat Negara selalu dalam ancaman kerusuhan, anarki, dan kekerasan yang berdarah.

Untuk sampau ke demokrasi, para elite itu harus menapak ke satu tahap yang lebih maju lagi, yaitu mengubah struktur elite dari situasi konflik tanpa adanya aturan main bersama yang disepakati menuju kompetisi elite dalam prosedur demokrasi. Semua Negara yang berhasil bertransisi ke demokrasi dianggap berhasil mentransformasi struktur elite itu. Elit atas keinginan mereka sendiri mengambil inisiatif untuk menerapkan prosedur demokrasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan di antara mereka.

Teori elite adalah literature mutakhir dalam teori transisi menuju demokrasi. Teori sebelumnya terlalu banyak menekankan factor structural, seperti factor ekonomi ataupun kultur, namun melupakan factor actor politik yang mampu membuat hasil politikm berbeda.

Sebelumnya, demokrasi dianggap hanya realistic bagi Negara yang telah melampaui tingkat ekonomi tertentu. Hanya Negara yang secara ekonomi cukup kaya yang mampu memiliki demokrasi yang stabil. Alasannya sederhana, demokrasi me-merlukan pendukung utama. Kelas menengah dianggap pendukung utama demokrasi. Ungkapan Barrington Moore tentang hal ini sangat terkenal: "Tanpa kelas menengah, tak ada demokrasi" . Hanya Negara yang relative

kaya yang memiliki mayoritas kelas menengah yang terdidik dan berpenghasilan cukup.

Teori demokrasi selanjutnya memberikan perspektif lain. Yang penting untuk demokrasi, bukan semata ekonomi, tetapi kultur. Yaitu kultur dominan yang menghargai keberagaman, kompromi, sikap moderat dan hak-hak individu. Tanpa adanya kultur, yang diberi nama civic culture ini, demokrasi tidak akan berkualitas dan dengan mudah kembali jatuh menuju sistem yang tidak demokratis. Civic Culture itu umumnya terdapat di Negara barat yang memang kuat tradisi liberalism dan individualismenya.

Namun teori elite membantah dua teori di atas, dengan bukti empiris ataupun dengan logika teori. Tingkat ekonomi ataupun jumlah kelas menengah tidak menjadi prasyarat bagi demokrasi yang bertahan lama. Ekonomi Negara Singapura sangatlah tinggi. Sementara ekonomi India sangatlah rendah. India mempraktekan demokrasi sudah puluhan tahun, namun Singapura belum dapat disebut Negara demokrasi. Demokrasi pun dapat tumbuh di berbagai kultur yang beragam, tidak hanya di barat saja, tetapi juga di Amerika Latin, dan Asia.

Satu hal penting diabaikan oleh dua teori di atas, yaitu variable actor politik, dalam hal ini elite politik. Para elite dapat membuat hasil politik berbeda. Elite ini bukanlah actor yang pasif, yang perilakunya ditentukan oleh kelas ekonomi, latar belakang kultur ataupun agama. Elite dianggap sebagai actor yang independen yang punya pilihan bebas, yang bisa bertindak berbeda dengan kepentingan ekonomi ke-lompoknya dan berbeda dengan latar belakang kultur dan gagasannya.

Namun untuk bertransisi menuju demokrasi, para elite itu harus melampaui tiga tahap di atas secara berhasil. Yaitu dari elite yang bersatu secara ideologis di bawah sistem otoriter, lalu berubah

menjadi elite yang berkonflik dan menjatuhkan Negara otoriter, kemudian berttransformasi lagi menuju elite yang berkompetisi dalam prosedur demokratis.

Kondisi elite di Negara kita saat ini baru sampai pada tahap kedua. Elite di Negara kita pernah bersatu secara ideologis di bawah pimpinan Presiden Soeharto dalam sistem Negara otoriter. Tahap ini sudah dilalui. Lalu datang krisis ekonomi yang dasyat dan kegagalan pimpinan nasional saat itu untuk melakukan reformasi yang dikehendaki. Sebagian elite mulai menarik dukungannya kepada pimpinan nasional dan sistem Negara otoriter. Terjadi perpecahan elite secara serius, terutama setelah pimpinan MPR menghendaki Presiden Soeharto mundur dan beberapa anggota cabinet berniat mengundurkan diri. Presiden Soeharto beserta Negara otoriter kehilangan legitimasi dan jatuh.

Satu tahap lagi yang kini dibutuhkan elite politik, yaitu transtransformasi konflik di antara mereka menjadi kompetisi politik yang sehat di bawah prosedur demokratis. Jika transformasi ini gagal dilakukan, Negara kita akan semakin jatuh dalam konflik berkepanjangan. Bukan tidak mungkin pula Negara kita akan terpecah seperti halnya yang terjadi di Negara Uni Soviet dan Yugoslavia.

Transformasi konflik elite itu memang bukan hal yang mudah. Diperlukan kualitas elite tertentu untuk melakukan transformasi ini yang melampaui kepentingan jangka pendeknya. Elite yang mampu memimpin transformasi ini bukan hanya elite yang kuat secara politik, namun ia juga harus mempunyai kualitas negarawan yang visioner dan tidak terikat pada kepentingan sesaat.

Sidang Istimewa MPR 1998 kali ini sebenarnya adalah forum yang sangat baik untuk mentransformasikan konflik elite itu. Memang MPR ini belum representatif. Dalam arti anggota MPR ini bukan

mereka yang dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu yang demokratis. Mayoritas anggota MPR diangkat oleh presiden. Yang dipilih pun juga tidak melalui pemilu yang jujur dan adil. Namun inilah forum yang ada, yang terbaik dari pilihan lain yang lebih buruk.

Sidang MPR hanya berhasil mentransformasikan elite jika MPR dapat menghasilkan prosedur politik baru yang disepakati. Agar disepakati, prosedur politik itu harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang dipraktekkan oleh berbagai Negara di semua Negara. Tanpa adanya rasa adil dalam prosedur politik baru itu, sidang MPR bahkan dapat memperburuk keadaan, dengan menambah parah konflik elite politik yang ada. Sidang MPR bahkan dapat menghasilkan bom waktu, yang akan meledak lebih keras di kemudian hari.

Satu isu yang terus mengganggu rasa keadilan dan prinsip demokrasi adalah penjataan kursi DPR kepada prajurit ABRI. Tidak kurang dari pakar konstitusi UUD 45, Prof. Dr. Ismail Sunni, mengatakan bahwa pengangkatan anggota DPR ini menentang aturan konstitusi UUD 45. Ini bahkan dapat memperburuk citra ABRI sendiri, yang selama ini mengklaim sebagai penjaga konstitusi Negara, ternyata mem-ilih kebijakan yang tidak konstitusional.

Parlemen Negara demokrasi di seluruh dunia disediakan bagi mereka yang mengikuti pemilu. Parlemen itu adalah tempat bagi wakil rakyat. Berarti rakyatlah yang memilih wakilnya. Mekanisme pengisian anggota parlemen harus melalui proses pemilihan, bukan pengangkatan.

Rasa keadilan juga terganggu oleh mekanisme pengangkatan itu. Sebanyak lebih dari seratus partai politik akan berkompetisi dengan susah payah untuk mendapatkan kursi di DPR. Dengan kerja keras dan pengorbanan, belum tentu mere-ka mampu memperoleh kursi sebesar 5%. ABRI yang tidak mengikuti pemilu diberi jatah 10%. Jelaslah ini akan memicu konflik yang lebih besar di masa datang.

Dalam sejarah manusia, tidak ada sistem yang tidak adil mampu bertahan la-ma. Ia mungkin mampu bertahan jika disokong oleh kekerasan. Namun sudah terbukti pula, tidak ada kekerasan yang langgeng yang mampu memelihara ketidakadilan. Ia melawan hukum alam.

Para anggota MPR dan pimpinan ABRI kini dihadapkan kepada saat kritis yang akan menentukan bulat lonjongnya Negara kita. Mereka dihadapkan pada dua pilihan. Apakah mereka memilih menjadi politisi biasa yang mementingkan kepentingan jangka pendek, walau dalam jangka panjang mereka tahu pilihan itu akan memperburuk keadaan. Ataukah mereka mamilih menjadi negarawan, yang melampaui kepentingan jangka pendek, dan di romantisasi untuk membentuk sebuah sistem baru yang dirasakan adil, sesuai dengan prinsip demokrasi dan bertahan lama.

Pilihan itu ada di tangan mereka. Namun, kita sebagai bagian dari masyarakat dapat turut menunjukkan bahaya dan manfaat dua pilihan itu. *

Kelemahan IMF

INTERNATIONAL Monetary Fund (IMF) kini sedang disorot. Dalam tiga bulan terakhir lembaga keuangan ini dilibatkan untuk menanggulangi krisis ekonomi di Asia. Paket bantuan IMF sudah dirumuskan, termasuk pinjaman sekitar US\$ 100 milyar kepada Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Sebagian rekomendasi ekonomi lembaga ini sudah pula dijalankan, seperti likuidasi Bank. Tetapi krisis uang yang ada di Asia tidak kunjung reda, bahkan ada kemungkinan memburuk. Kini mulai dipertanyakan, seberapa jauh kompetensi IMF untuk menanggulangi krisis itu?

Di markas pusatnya di AS, IMF justru mendapat kritik keras, tidak hanya dari kubu liberal, melainkan juga dari kaum konservatif. Dalam mrespon kebijaksanaan ekonomi politik, dua kubu ini acapkali bertentangan karena bersandar pada filsafat dasar yang berbeda. Tetapi terhadap IMF, dua kubu ini memiliki ketidakpuasan yang sama, walau dengan alasan dan rekomendasi yang berlainan.

Kubu liberal diwakili Jeffrey Sachs, ekonom ternama yang mengepalai Har-vard Institute for International Development. Sachs, sebagaimana kaum liberal lain, tidak keberatan dengan campur tangan lembaga public seperti IMF untuk mengatasi krisis ekonomi, asalkan campur tangan itu dilakukan dengan perhitungan cermat dan bersandar pada kaidah keilmuan.

Sachs menyoroti kompetensi IMF dalam menganalisis dan memberikan solusi atas krisis ekonomi di Asia. Melihat laporan tahunan IMF pada 1997, menurut Sachs IMF tidak sedikitpun memberikan sinyal akan terjadinya krisis. Laporan itu bahkan mempunyai kinerja makro ekonomi mengesankan. Pemerintah Thailand dianggap cakap membuat kebijaksanaan makroekonomi. Ternyata Negara yang dipuji IMF itu justru dilanda krisis.

Keraguan Sachs mengenai kompetensi IMF bersandar pada tiga alasan. per-tama, keterbatasan tenaga ahli di IMF. Lembaga ini memiliki sekitar 1.000 ekonom yang bertugas memberikan arah perekonomian 75 negara berkembang dengan jumlah total separuh yang benar-benar bertugas penuh. Setiap Negara kira-kira dipantau tujuh ekonom. Jumlah ini, ujar Sachs, tidak memadai untuk mengetahui kondisi riil ekonomi sebuah Negara yang kompleks.

Kedua, tidak ada keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan ke-bijaksanaan. Ini yang mengejutkan. Memang ada siaran pers yang dapat diakses pub-lik. Tetapi siaran per situ hanya bersifat umum, minim informasi yang detail dan teknis. Ini menyulitkan para ahli di luar IMF untuk melakukan evaluasi yang kritis atas program IMF. Kurangnya keterbukaan ini tidak merangsang perdebatan profes-sional yang dapat menguji apakah IMF sudah mengambil langkah yang benar.

Ketiga, berpengaruhnya factor non ekonomi terhadap kinerja ekonomi. Krisis di Asia, menurut Sachs, tidak semata-mata disebabkan

problem fundamental ekonomi. yang jauh lebih berpengaruh adalah panic dan hysteria masa. Awal panic memang dapat disebabkan pelaku ekonomi itu sendiri, seperti salah perhitungan dan utang jangka pendek yang jatuh tempo. Tapi jika panic itu meluas, solusi ekonomi semata tidak akan mampu mengatasinya.

Karena tiga alasan itu, IMF sangat mungkin tidak memberikan terapi maksimal atas krisis di Asia. Sachs memberikan contoh detail tentang berbagai rekomendasi ekonomi IMF terhadap Korea Selatan. Sachs kemudian menunjukkan betapa rek-omendasi tersebut dapat memperburuk situasi Negara itu.

Berbeda dengan Sachs, kaum konservatif mengkritik IMF dengan alasan lain. James K. Glassman dari American Interprise Institute menulis kolom di Washington Post , awal Desember 1997. Menurut Glassman, sebagaimana diyakini kaum kon-servatif, mekanisme pasar bebas selalu lebih efisien dalam menanggulangi krisis ekonomi. Memang intervensi lembaga politik seperti IMF dalam jangka pendek seolah-olah dapat menolong, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan efek lebih buruk.

Menurut pandangan ini, membantu sebuah pemerintahan yang tidak berhasil mengurus ekonominya akan membuat Negara lain tidak khawatir untuk turut tidak becus, dengan harapan akan juga dibantu IMF. Contohnya, Meksiko dan juga Nega-ra-negara di Asia pada 1995, Meksiko dibantu IMF sebesar US\$ 50 milyar, dan sekarang memang bertambah baik. Tapi kasus ini membuat pemerintah di Asia juga berkeyakinan bakal dibantu jika berada dalam krisis.

Jika IMF tidak membantu, mekanisme pasar bebas, menurut Glassman, akan menyelesaikan krisis itu dengan cara lebih efisien. Pasar bebas memang akan menghukum pelaku ekonomi manapun, baik pengusaha maupun pemerintah Negara bersangkutan yang melakukan kesalahan. Tetapi dalam jangka panjang, berbagai pihak

akan lebih berhati-hati membuat kebijaksanaan. Bantuan IMF hanya mengganggu bekerjanya hukum besi mekanisme pasar.

Dalam kasus Indonesia, menurut saya, seandainya harus diberikan kritik terhadap IMF, yang menjadi kritiknya adalah keterbatasan dan ketidakmampuan lembaga ini memaksa sebuah pemerintahan nasional untuk konsisten melakukan reformasi ekonomi. *

Manajer Ekonomi

GERAKAN reformasi masa kini sangat memperhatikan karena telah ke-hilangan menajernya yang efektif. Di era sebelum lengsernya Soeharto, kita masih mempunyai dua manajer yang mampu menyalurkan dan memberi focus perubahan. Pertama, Amien Rais, yang menjadi juru bicara dan bermain di tingkat elite. Kedua, gerakan mahasiswa, yang bergerak di level massa. Sekarang keduanya telah ke-hilangan momentum.

Amien Rais kini sudah menjadi pemimpin sebuah partai. Di era kompetisi partai, puluhan partai lainnya tidak lagi ingin menjadikan Amien Rais sebagai imam gerakan. Sebaliknya, Amien dipandang sebagai competitor yang mengancam. Amien tidak lagi menjadi figure sentral. Kewibawaan politiknya merosot jauh dibandingkan dengan sebelumnya.

Gerakan mahasiswa mengalami nasib yang serupa. Fragmentasi politik masyarakat kini juga memasuki dunia kemahasiswaan. Mereka

yang dulu bersatu dalam gerakan moral kini terpecah belah dalam aneka pengelompokan politik. Makin sulit bagi kelompok mahasiswa untuk membuat gerakan bersama. Kekuatan mereka, sebagai kelompok penekan, akibatnya merosot jauh. Simpati masyarakat kepada gerakan mahasiswa juga telah sangat berkurang.

Hilangnya manajer yang efektif mengakibatkan gerakan reformasi kini menjadi tumpul. Pada awalnya gerakan ini bagai air bah yang luar biasa kekuatannya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, politik masyarakat yang sebelumnya begitu lemah mampu mentransformasikan diri secara sangat cepat dan menjadi kekuatan politik yang sangat ampuh. Ujungnya, gerakan itu berhasil menjatuhkan sebuah rezim otoriter, salah satu rezim yang terkuat dan terlama di Asia.

Akibat gerakan itu, terjadi perubahan besar dalam politik di Tanah air. Jelaslah, kini Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Negara otoriter lagi. Kebebasan berorganisasi dan pers, hilangnya monoloyalitas pegawai negeri kepada Golkar, serta pulihnya hak memilih dan dipilih para anggota PKI adalah perkembangan yang luar biasa. Perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini tidak terbayangkan oleh siapa pun tiga tahun lampau.

Namun, sebelum transisi ke demokrasi itu terjadi secara tuntas, gerakan reformasi telah kehilangan momentum. Akibatnya, kini kitan hanya berada dalam kondisi transisi yang labil. Sistem otoriter sudah tertolak, namun demokrasi yang sejati belum diraih. Kekuatan penekan reformasi menuju demokrasi yang tuntas sudah keburu loyo.

Di DPR, para wakil rakyat sudah tidak lagi berdebat perlu tidaknya pengangkatan wakil ABRI sebagai anggota lembaga tersebut. perdebatan sudah bergeser ke jumlah anggota ABRI yang harus diangkat. Sungguh pun pembahasan mengenai jumlah itu sangat a

lot, namun dari perspektif demokrasi pembahasan ter-sebut tidak signifikan. Berapa pun jumlah yang diangkat telah membuat lembaga perwakilan rakyat itu tidak lagi merupakan representasi dari hasil kompetensi politik melalui pemilihan umum secara murni.

Pemilu Juni 1999 mekin beresiko pula. Benar bahwa pemilu adalah satu-satunya mekanisme yang demokratis untuk mendapatkan legitimasi politik. Namun, pemilu tersebut selalu dibayangi oleh ancaman kerusuhan masal. Pemilu tersebut ter-lalu mudah digagalkan oleh kerusuhan spontan masyarakat yang makin tinggi kemarahannya. Apalagi jika dikomando oleh provokator profesional, pencurian kotak suara dapat terjadi di banyak tempat, dan dengan mudah dapat dijadikan alasan untuk mengurangi legitimasi pemilu.

Supremasi sipil atas militer belum mampu diwujudkan. Reformasi atas konstitusi UUD 1945 yang banyak cacatnya itu juga belum dapat dikerjakan. Netralitas pegawai negeri masih terus dalam perdebatan. Krisis ekonomi yang ada juga mem-perburuk pertarungan politik. Perubahan yang baru mampu diraih oleh gerakan reformasi hanyalah demokrasi yang terbatas dan labil.

Demokrasi yang terbatas seperti sekarang itu tidak dapat secara otomatis berubah menjadi demokrasi yang terbatas ini hanya untuk sementara di era transisi saja. Demokrasi terbatas tersebut dapat saja berlangsung selamanya. Turki adalah contoh Negara yang menerapkan demokrasi terbatas sejak 1950-an sampai kini. Belum ada tanda-tanda Turki akan berubah menuju demokrasi penuh setelah 40 tahun lebih keluar dari Negara otoriter. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Turki?

Memang, literature demokratisasi mutakhir tidak lagi menyerahkan soal demokratisasi kepada perkembangan hal makro, misalnya kemajuan ekonomi, bertambahnya kelas menengah, atau menguatnya kultur liberal. Demokratisasi sepenuhnya dianggap

persoalan kerja politik para actor. Adalah kepiawaian, strategi, pilihan nilai para actor politik itu sendiri yang akan menentukan demokratisasi, bukan actor lainnya. Peran seorang manajer yang efektif sangatlah sentral dalam menyatukan para actor perubahan tersebut.

Ironisnya, justru manajer efektif itulah yang kini abesn. Kini kita terombang ambing. Sistem otoriter lama memang telah kehilangan pemimpin efektif. Namun, gerakan reformasi juga mengalami hal yang sama. Orde Baru agaknya memang terlalu kuat untuk roboh hanya dalam sekali pukul. *

DAFTAR PUSTAKA

- Diamond, Larry et.al., Democracy in Developing Countries, Asia, (USA: Lyne Rin-ner, Inc, 1978).
- _____, "Toward Democrati Consolidation" , Journal of Democracy, Vol. 5., July 1994
- Dunn, William N., Public Policy Analysis (USA: Prentice-Hall Inc., 1994)
- Dye, Thomas R. and Harmon Zeigler, The Irony of Democracy (USA: Brooks/ Cole Publishing Company, 1990)
- Friedman, Milton and Rose, Free to Choose: A Personal Statement (New York: Har-court Brace Janovich, 1990)
- _____, Freedom and Capitalism (USA: University of Chicago, 1982)
- Gray, John, Liberalism: essay in Political Philosophy (London: Routledge, 1990)
- Huntington, Samuel, "A New Wave of Democracy, Religion and Global Democracy" , Current, December 1991.
- Kingdon, John, W., Agendas, Alternatives and Public Policies (USA: Harper Collins, 1984).
- Liddle, William R., Leadership and Culture(USA: Allen & Unwin Pty, Ltd., 1996)
- Lipset, Seymour M., Political Man : Social Base of Politics (New York: Anchor, 1963).
- Lubis, Mulya T., In Search of Human Rights (Jakarta: Gramedia, 1993).

Najjar, Fauzi M., "The Debate on Islam and secularism in Egypt" , Arab Studies Quarterly, Vol. 18, No.2 Spring 1996.

Ravith, Diane (ed.),The Democracy Reader (USA: Harper Perennial, 1992)

Robertson, David, A Dictionary of Modern Politics (Philadephia: Taylor and Francis, 1985).

Russel, Bertrand, Kekuasaan : Sebuah Analisis Sosial Baru (Jakarta: Yayasan Obor, 1988).

Sandel, Michael, Liberalism and It' s Critics (USA: New York University Press, 1984)

Stone, Deborah, Policy Paradox and Political Reason (USA: Harper Collins, 1988).

DAFTAR BUKU DENNY J.A

1. DEMOCRATIZATION FORM BELOW PROTEST EVENTS AND REGIME CHANGE IN INDONESIA Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
2. THE ROLE OF GOVERNMENT IN ECONOMY AND BUSINESS, Penerbit LKIS, 2006
3. VARIOUS TOPICS IN COMPARATIVE POLITICS, Penerbit LKIS 2006
4. DEMOKRASI INDONESIA : Visi Dan Praktek (Kumpulan Tulisan Di Harian Kompas), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
5. JALAN PANJANG REFORMASI (Kumpulan Tulisan Di Suara Pembaruan), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006
6. MELEWATI PERUBAHAN Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia (Kumpulan Tulisan Di Jawa Pos Dan Indopos), Penerbit LKIS, 2006
7. POLITIK YANG MENCARI BENTUK (Kumpulan Kolom Di Majalah Gatra), Penerbit LKIS, 2006
8. MEMBANGUN DEMOKRASI SEHARI-HARI (Kumpulan Tulisan Di Media Indonesia), Penerbit LKIS, 2006
9. PARTAI POLITIK PUN BERGUGURAN (Kumpulan Tulisan di Republika), Penerbit LKIS 2006
10. MANUVER ELIT, KONFLIK DAN KONSERVATISME POLITIK (Kumpulan Tulisan di Koran Tempo), Penerbit LKIS, 2006
11. PARA POLITISI DAN LAGUNYA (Kumpulan Tulisan di Rakyat Merdeka dan Harian Seputar Indonesia), Penerbit LKIS 2006

12. MEMPERKUAT PILAR KELIMA, Pemilu 2004 dalam Temuan Survei LSI, Penerbit LKIS 2006
13. VISI INDONESIA BARU SETELAH REFORMASI 1998, Penerbit LKIS 2006
14. CATATAN POLITIK, Penerbit LKIS 2006
15. JATUHNYA SOEHARTO DAN TRANSISI DEMOKRASI, Penerbit LKIS 2006
16. MEMBACA ISU POLITIK, Penerbit LKIS 2006
17. GERAKAN MAHASISWA DAN POLITIK KAUM MUDA ERA 80-AN, Penerbit LKIS 2006
18. ELECTION WATCH :MERETAS JALAN DEMOKRASI (Talkshow Denny J.A di Metro TV), Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
19. PARLIAMENT WATCH: EKSPERIMENT DEMOKRASI: DILEMA INDONESIA (Talkshow Denny J.A. di Metro TV).Penerbit Pustaka Sinar Harapan 2006
20. NAPAK TILAS REFORMASI POLITIK INDONESIA (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006
21. JEJAK-JEJAK PEMILU 2004 (Talkshow Denny J.A. Dalam "Dialog Aktual" Radio Delta FM), Penerbit LKIS 2006